

# JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK

VOLUME 2, NO 1 Tahun 2017

Jurnal **Dialektika Publik** adalah media untuk mempublikasikan karya ilmiah bidang ilmu Administrasi yang ada di dalam jurnal ini merupakan hasil dari kajian ilmu administrasi yang meliputi Otonomi Daerah, Administrasi Birokrasi, Kebijakan Publik, E-government, Keuangan Negara dan Pelayanan Publik, Manajemen Perusahaan Publik, Hukum Administrasi Negara dan Kajian Sosial dan kajian lain yang erat kaitannya dengan Ilmu Administrasi Negara. Semoga Jurnal Dialektika Publik dapat membantu pembaca, untuk dapat memahami Ilmu Administrasi Negara baik secara teori dan empiris.

Diterbitkan oleh	: LPPM Universitas Putera Batam
Pelindung	: Rektor UPB
Penasehat	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPB
Penanggung Jawab	: Ketua Program Studi Administrasi Negara
Ketua Penyunting	: Timbul Dompok, S.E., M.Si
Anggota	: Dr. Razaki Persada, S.E., M.Si
Ketua Redaksi Pelaksana	: Riko Riyanda, S.I.P., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Ulima Harma, S.AP., M.A.P.
Editor	: Timbul Dompok, S.E., M.Si
Layout dan desain	: Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.
Administrasi Umum	: Zulfiana Dessyka Putri, S.Pd, M.Pd

**Alamat Redaksi :**  
**LPPM UNIVERSITAS PUTERA BATAM**  
**Jl. R. Soeprapto-Tembesi-Batam-Kepulauan Riau**  
**Telepon : (0778)-7001000**  
**HP : 0852 6342 1275**  
**Email : [dialektikapublikupb@puterabatam.ac.id](mailto:dialektikapublikupb@puterabatam.ac.id)**  
**(Terbit 2 kali dalam satu tahun : Juli dan Desember)**

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Jurnal Ilmiah Manajemen merupakan media publikasi ilmiah yang berfokus pada pengembangan ilmu manajemen. Semua tulisan dalam jurnal ini merupakan hasil kajian dari ilmu manajemen yang memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Jurnal ini memberikan kesempatan bagi semua insan pendidikan, akademisi, dan praktisi untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu manajemen. Tulisan yang diterbitkan harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dari ilmu manajemen. Setiap naskah tulisan yang dimuat melalui proses seleksi (blind review) dan evaluasi dari dewan editor.
2. Naskah dikirim dalam dua bentuk yaitu: (1) file elektronik dan (2) hardcopy (2 buah). Penyerahan dilakukan melalui:
  - a) File elektronik : : **dialektika.publik@gmail.com**
  - b) Hardcopy : **UNIVERSITAS PUTERA BATAM**  
**Jl. R.Soeprapto – Tembesi – Batam – Kepri**  
**Telepon : 0778 – 7001000**  
**HP : 082 160 200 899**  
**HP : 085 270 477 774**
3. Panjang tulisan keseluruhan tidak lebih dari 7.000 kata, diketik dengan 1,5 spasi menggunakan font "Times Roman 12". Jumlah tabel dan gambar paling banyak 10 buah. Dan masing-masing tabel dan gambar harus diberi nomor bagian atas dengan penomoran lengkap dengan sumber. Jumlah halaman maksimal 30 halaman.
4. Penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata dan diberi kata kunci sebanyak 3-5 kata.
5. Penulisan daftar pustaka dan referensi mengikuti metode "harvard". Di dalam teks kutipan hanya nama belakang penulis, tahun publikasi dan nomor halaman, jika perlu. Di akhir tulisan, seluruh referensi dalam teks harus dicantumkan dan ditulis berurutan menurut abjad dari nama belakang penulis. Contoh: Salunke, D.K. and B.B. Desai. 1984. *Post Harvest Biotechnology of Fruit and Vegetables*. Food Processing Technology Inc. Cleveland Ohio. p. 44-128.
6. Persamaan matematika diharapkan menggunakan Microsoft Equation Editor dan diberi nomor persamaan.
7. Catatan kaki dibuat seminimum mungkin dengan huruf berukuran kecil, disusun berdasarkan urutan dan diletakkan dibawah pada halaman yang sama.
8. Apendiks dapat digunakan penulis untuk menyajikan atau menjabarkan penurunan atau pembuktian yang memberikan penjelasan terhadap suatu bagian tulisan.

Dengan dipublikasikannya tulisan dalam jurnal ini, maka penulis menyerahkan hak meng-copy (copy) dan hak abstrak kepada Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Manajemen, dan kami berhak mempublikasikannya.

## **DAFTAR ISI**

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN BATU AJI – KOTA BATAM - Timbul Dompok, Nikita Simarmata**

**KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ANAK JALANAN (KAJIAN KASUS DI BEBERAPA DAERAH) - Riko Riyanda**

**POTENSI UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DAERAH - Hari Susanta Nugraha, Rabi Jihan Amaruli, dan Darwanto**

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI DI KELURAHAN MUKA KUNING KECAMATAN SI BEDUK, KOTA BATAM) - Linayati Lestari**

**SERVICE QUALITY OF BENGKULU CITY FIRE DEPARTMENT - Bobi Mandala Putra**

**PENERAPAN ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2009 DAN PP 27 TAHUN 1999 - Wira Haryanti**

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PARTISIPASI  
MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN  
BATU AJI – KOTA BATAM**

**Timbul Dompok**

*Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam*

**Nikita Simarmata**

*Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam*

**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of Knowledge (X1) and Attitude (X2) on Community Participation in Waste Bank Management (Y) in Batu Aji Sub-district, Batam City. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to the garbage bank management unit located in Batu Aji district. This study used a saturated sample of 38 respondents. Data analysis used is multiple linear regression. The conclusions of the results of this study indicate that: (1). Partially that Knowledge influence to Community Participation in Waste Bank Management ( $t \text{ count} = 5,736 > t \text{ table} = 2,030$ ); (2). Partially that Attitudes not affect Community Participation in Waste Bank Management ( $t \text{ count} = 1.176 < t \text{ table} = 2,030$ ); (3). Simultaneously Knowledge and Attitudes significantly influence the Community Participation in Waste Management Bank ( $F \text{ count} = 16.666 > F \text{ table} = 3.27$ ).

*Keywords: Knowlwdge, Attitude, Participation, Waste Bank Management*

## **1. PENDAHULUAN**

Masalah lingkungan adalah masalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia, salah satu masalah lingkungan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah masalah sampah. Seperti yang diungkapkan dalam UU RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa dari pembuangan yang dihasilkan baik berbentuk cairan, padat yang dihasilkan dari rumah tangga maupun instansi. Setiap manusia memiliki potensi untuk menghasilkan sampah. Semakin besar jumlah manusia dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka jumlah sampah akan terus meningkat hal ini disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan yang mencapai 2-4% per tahun, bila tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan. (Damanhuri, 2010).

Di Kota Batam sendiri, pada tahun 2014 total volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Batam sebanyak 432,264 ton per tahun (<http://skpd.batamkota.go.id/kebersihan/>). Hal ini tidak sesuai dengan total sampah

yang terangkut, yakni hanya 295,546 ton. Ada banyak hal yang menjadi akibat dari tidak terangkutnya seluruh sampah yang dihasilkan tersebut, salah satu diantaranya adalah mengenai fasilitas armada pengangkut sampah yang tidak seimbang dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

Menanggapi hal itu, pemerintah bahkan telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi peningkatan sampah yang akan terus bertambah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah kota Batam membuat suatu program pengurangan sampah yang tertuang dalam Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, salah satu program yang ada didalamnya adalah program bank sampah.

Program Bank Sampah menjadi momentum awal membina kesadaran masyarakat untuk memilah, mendaur-ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di Kota Batam. Tujuan program Bank Sampah yaitu merubah paradigma "kumpul-angkut-buang" menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dalam Bank Sampah dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran-ulang dan pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah Kota Batam menetapkan Koperasi Adijaya menjadi pengelola Bank Sampah berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam No KPTS.230/HK/IV/2014 tanggal 28 April 2016. Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 telah terbentuk Unit Bank Sampah Batam yang dikoordinir oleh Ibu-ibu Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Seperti data yang dirilis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam bahwasanya Kecamatan Batu Aji memiliki 38 unit bank sampah, dengan 1.712 nasabah, serta menghasilkan 54.846 kg sampah (data Januari 2016-Juni 2016). Data ini menunjukkan Kecamatan Batu Aji memiliki jumlah terbesar baik dari terbanyak baik dari jumlah unit pengelola bank sampah, nasabah dan produksi sampahnya.

Dengan melihat pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji?
2. Bagaimana pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi masyarakat pada pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji.
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat pada pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap partisipasi masyarakat pada pengelolaan bank sampah di kecamatan Batu Aji.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengetahuan**

Pengetahuan (*knowledge*) merupakan hasil dari tahu dan pengalaman seseorang dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu rangsangan tertentu (suatu objek tertentu). Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007). Indikator pengetahuan secara ringkas adalah; (1) Tahu (*know*), (2) Memahami (*comprehension*), (3) Aplikasi (*application*), (4) Analisis (*analysis*), (5) Sintesis (*synthesis*), (6) Evaluasi (*evaluation*) (Notoatmodjo, 2007).

### **Sikap**

Notoatmodjo menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi adalah merupakan “pre-disposisi” tindakan atau perilaku. Sikap seseorang pada akhirnya dapat membentuk sikap sosial, manakala ada keseragaman sikap terhadap suatu obyek pengetahuan yang dimiliki orang. (Gerungan, 2009). Secara ringkas komponen-komponen sikap adalah; (1) Kognitif, (2) Afektif, (3) Konatif.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Huraerah, 2008), partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Faktor utama pendukung partisipasi masyarakat adalah : (1) kemauan, (2) kemampuan, (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat, menurut Watson bahwa ada beberapa kendala yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu. Salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif. Karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki minat untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri (Soetomo, 2008).

**Penelitian Terdahulu**

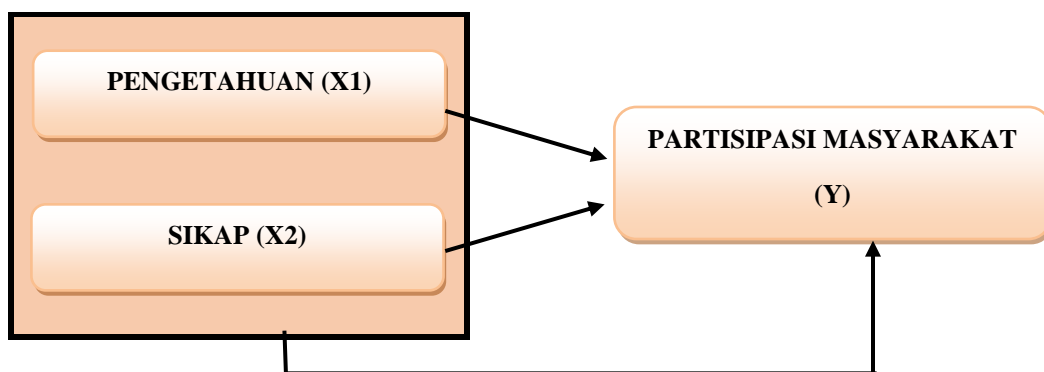
**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Rohmiati Amini, Musniasih Yuniati, Baiq Salkiah	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCDF-IFAD) di Kabupaten Lombok Barat	Teknik Analisis Regresi logistic binary	Pendidikan, Pekerjaan sampingan, Jumlah anggota Rumah tangga, Aktivitas sosial, Usia	Pendidikan, Pekerjaan sampingan, Jumlah anggota Rumah tangga, Aktivitas social, Usia memepengaruhi masyarakat dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCDF-IFAD) di Kabupaten Lombok Barat
2	I Ketut R. Suarditha, Ari Saptono, Aprilia Widyastuti	Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Warga Sejahtera Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur	Teknik Analisis Data Regresi Linear Berganda	Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Partisipasi	Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Partisipasi berpengaruh secara parsial dan simultan.

3	Rizaldy Rizky Pratama, Ketut Prasetyo	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Nelayan Dalam Pelestarian Mangrove Di Pantai Timur Surabaya	Teknik Analisis Data Regresi Linear Berganda	Pendidikan, Pendapatan, Pengetahuan, Partisipasi	Pendidikan, Pendapatan, Pengetahuan berhubungan terhadap Partisipasi dalam pelestarian mangrove di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Gununganyar Tambak adalah variabel pengetahuan
4	Aditama, Adelina Hasyim, M. Mona Adha	Pengaruh Sikap Dan Motivasi Terhadap Partisipasi Dalam Pelaksanaan Siskamling	Teknik Analisis Data Regresi Linear Berganda	Sikap, Motivasi, Partisipasi	Sikap, Motivasi berpengaruh terhadap Partisipasi dalam Siskamling
5	Nur Afriyani	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban	Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif	Kesempatan untuk berpartisipasi, Kemampuan untuk berpartisipasi, Kemauan	Kemauan dan kemampuan pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan masih rendah

**Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti menyusun bagan alur kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1.** Alur Kerangka Pemikiran

**Hipotesis Penelitian**



Berdasarkan kerangka pemikiran serta tinjauan pustaka yang dijelaskan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Pengetahuan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Batu Aji.
- H<sub>2</sub> : Sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Batu Aji.
- H<sub>3</sub> : Pengetahuan, sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Batu Aji.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah unit pengelola bank sampah di Kecamatan Batu Aji Kota Batam yang berjumlah 38 pengelola. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampel Jenuh yaitu suatu teknik penarikan sampel digunakan apabila keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun sampel penelitian sebanyak 38 responden.

### **Metode Pengolahan Data**

Di dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan menggunakan software SPSS. Setelah kuesioner disebar, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Pengujian uji pengaruh dilakukan adalah analisis regresi linier berganda, uji statistik t dan uji statistik F.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Demografi Profil Responden**

Responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam beberapa karakteristik responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur dan lama bekerja. Uraian berikut ini merupakan penjelasan karakteristik responden tersebut.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden

<b>Karakteristik</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
<b>Umur</b>	<30 tahun	6	15.8
	> 45 tahun	10	26.3
	31-35 tahun	7	18.4
	36-40 tahun	8	21.1
	41-45 tahun	7	18.4
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100.0</b>
<b>Pendidikan</b>	SD	2	5.3
	SMA	28	73.7
	SMP	4	10.5
	Akademi/Sarjana	4	10.5
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100.0</b>
<b>Lama Bergabung</b>	< 12 bulan	7	18.4
	> 24 bulan	12	31.6
	12- 18 bulan	12	31.6
	19-24 bulan	7	18.4
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data primer diolah (2017)

**Keterangan:**

1. Berdasarkan karakteristik umur diketahui responden kelompok pertama (<30 tahun) berjumlah 6 orang (15,80%), responden kelompok kedua (31-6 tahun) berjumlah 7 orang (18,40%), responden kelompok ketiga (36-40 tahun) berjumlah 8 orang (21,10%), responden kelompok keempat (41-45 tahun) berjumlah 7 orang (18,40%), dan responden kelompok kelima (diatas 45 tahun) berjumlah 10 orang (26,30)%.
2. Berdasarkan karakteristik pendidikan diketahui responden responden kelompok pertama (tamat SD) berjumlah 2 orang (5,30%), responden kelompok kedua (tamat SMP) berjumlah 4 orang (10,50%), responden kelompok ketiga (tamat setingkat SMA) berjumlah 28 orang (73,70%), responden kelompok keempat (tamat setingkat akademi/sarjana) berjumlah 4 orang (10,50%).
3. Berdasarkan karakteristik lama bergabung diketahui responden lama bergabung antara <12 bulan berjumlah 7 orang (18,40%), responden dengan lama bergabung antara 12-18 bulan berjumlah 12 orang (31,60%), responden dengan lama bergabung antara 19-24 bulan berjumlah 7 orang (18,40%), dan responden dengan lama bergabung lebih dari 24 bulan berjumlah 12 orang (31,60%).

### Hasil Uji Validitas Data

Keputusan untuk menentukan tingkat validitas adalah dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dengan menggunakan tabel *r product moment*. Dengan ketentuan atau rumus  $t_{tabel} n = N - K - 1$  ( $df = N - 2$ ) dimana  $N$  adalah jumlah responden,  $K$  adalah *construct* atau jumlah variabel independen dan 1 adalah uji 2 sisi (*two tail test*) dengan presisi 10% diperoleh  $r_{tabel} = 0.2709$ . Berikut hasil pengujian validitas data, dapat dilihat pada *Corrected Items Total Statistics*:

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas

Variabel		Corrected Item Total Correlation	Kesimpulan
<b>Pengetahuan</b>	X1.1	.609	Valid
	X1.2	.672	Valid
	X1.3	.579	Valid
	X1.4	.635	Valid
	X1.5	.444	Valid
	X1.6	.697	Valid
<b>Sikap</b>	X2.1	.374	Valid
	X2.2	.650	Valid
	X2.3	.353	Valid
<b>Partisipasi Masyarakat</b>	Y1.1	.595	Valid
	Y1.2	.562	Valid
	Y1.3	.679	Valid
	Y1.4	.628	Valid

Sumber: Data primer diolah (2017)

- Data memperlihatkan nilai Corrected Item Total Correlation untuk variabel Pengetahuan berkisar antara 0.444 sampai dengan 0.697. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel Pengetahuan adalah valid, karena memiliki nilai lebih besar dari nilai  $r_{tabel} = 0.2709$ .
- Data memperlihatkan nilai Corrected Item Total Correlation untuk variabel Sikap berkisar antara 0.353 sampai dengan 0.650. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel sikap adalah valid, karena memiliki nilai lebih besar dari nilai  $r_{tabel} = 0.2709$ .
- Data memperlihatkan nilai Corrected Item Total Correlation untuk variabel partisipasi berkisar antara 0.562 sampai dengan 0.679. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel Partisipasi adalah valid, karena memiliki nilai lebih besar dari nilai  $r_{tabel} = 0.2709$ .

### Hasil Uji Reliabilitas

Masalah realibilitas instrumen berhubungan dengan masalah ketepatan hasil. Kriteria uji reliabilitas adalah membandingkan *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

**Tabel 4.** Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Tingkat Hubungan	Keterangan
X1	<b>0,830</b>	0,600	Sangat Kuat	Reliabel
X2	<b>0,632</b>	0,600	Sangat Kuat	Reliabel
Y	<b>0,799</b>	0,600	Sangat Kuat	Reliabel

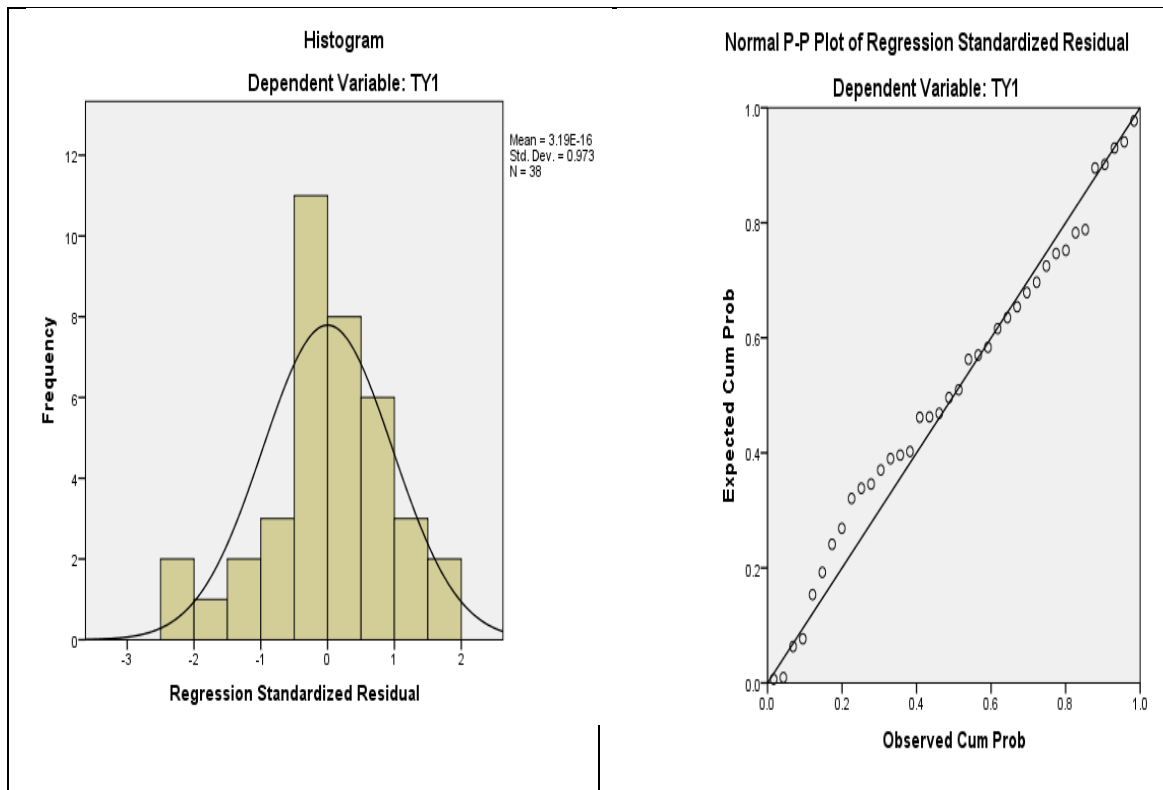
Sumber: Output SPSS

Data memperlihatkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Pengetahuan sebesar 0.830 dan untuk Sikap sebesar 0.632 dan Partisipasi sebesar 0.799. Semua butir pertanyaan untuk variabel Pengetahuan, Sikap dan Partisipasi Masyarakat adalah *reliable*, karena memiliki nilai di atas 0,600.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini diketahui dengan memperhatikan titik-titik pada *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Untuk memenuhi uji normalitas, grafik normal pola harus menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi uji normalitas.



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas

Dari gambar hasil uji normalitas di atas, penyebaran titik-titik di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi pada penelitian ini memenuhi uji normalitas.

**Multikolinearitas**

Untuk medeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

**Tabel. 5** Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TX1	.992	<b>1.008</b>
	TX2	.992	<b>1.008</b>

a. Dependent Variable: TY

Sumber : Data Output SPSS

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah variabel (X1) = 1,008, variabel (X2) = 1,008, kedua variabel bebas tersebut tidak terjadi

multikolinearitas karena nilai-nilai VIF variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* variabel bebas lebih besar dari 0,1.

**2. Uji Heteroskedastisitas**

Dasar pengambilan keputusan pada Uji heteroskedastisitas adalah :

- a). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan tidak terjadi heterokesdasitas.
- b). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan terjadi heterokesdasitas.

**Tabel 6.** Uji Gleyser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.348	1.899		1.236	.225
	TX1	-.093	.061	-.246	-1.532	<b>.135</b>
	TX2	.110	.098	.181	1.122	<b>.269</b>

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya kedua variabel baik Pengetahuan (X1) dan Sikap (X2) nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokesdastisitas.

**Hasil Uji Pengaruh**

**1. Hasil Regresi Linear Berganda**

Digunakan untuk meramalkan variabel dependen (Y) berdasarkan variabel independen (X) dalam suatu persamaan linear sebagai berikut:

**Tabel 7.** Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	<b>.106</b>	3.033	
	TX1	<b>.556</b>	.097	.697
	TX2	<b>.184</b>	.157	.143

Sumber : Output SPSS

Adapun bentuk persamaan dari hasil perhitungan diatas adalah berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,106 + 0,556 X_1 + 0,184 X_2$$

**2. Hasil Uji t**

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen X (bebas) terhadap variabel dependen Y (variabel terikat). Hipotesis dalam pengujian ini, sebagai berikut:

**H<sub>0</sub>** =Variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

**H<sub>1</sub>** =Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y

**Tabel 8.** Hasil Uji t

Model		Nilai t <sub>Hitung</sub>	Nilai t <sub>tabel</sub>	Sig.
1	TX1	5,736	2.030	0,000
	TX2	1,176	2.030	0,247

Sumber : Output SPSS

Keterangan :

- a. Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai t<sub>hitung</sub> (5,736) > t<sub>tabel</sub> (2.030), artinya terdapat pengaruh variabel independen (X1) terhadap variabel dependen (Y) maka H<sub>0</sub> ditolak H<sub>1</sub> diterima. Jadi Pengetahuan berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat.
- b. Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai t<sub>hitung</sub> (1,176) < t<sub>tabel</sub> (2.030), artinya terdapat pengaruh variabel independen (X2) terhadap variabel dependen (Y) maka H<sub>0</sub> diterima H<sub>1</sub> ditolak. Jadi Sikap tidak berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat.

**4. Hasil Uji F (simultan)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>) yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y)

**Tabel 9.** Hasil Uji F (simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.511	2	80.255	16.666	.000 <sup>b</sup>
	Residual	168.542	35	4.815		
	Total	329.053	37			

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  adalah 16,666 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  untuk 38 responden dan presisi 10% = 3,27, didapat nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $0,000 < 0,00$ , maka  **$H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima**. Dengan demikian menunjukkan Variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

### 3. Hasil Uji R dan R Square

Disebut Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), nilai ini digunakan untuk melihat sampai sejauh mana model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Diartikan juga sebagai ukuran ketepatan / kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil pendugaan terhadap data hasil observasi. Nilai ini juga merupakan besaran proporsi dari keragaman (Y) yang diterangkan oleh model regresi untuk mengukur besar sumbangan dari variabel bebas (X) terhadap keragaman variabel tidak bebas (Y).

**Tabel 10.** Hasil Uji R dan R Square

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.488	.459	2.19442

a. Predictors: (Constant), TX2, TX1

b. Dependent Variable: TY1

Sumber: Output SPSS

Dari tabel diatas, nilai R adalah 0,698, nilai  $R^2$  (*square*) adalah 0,488, dan *adjusted R square* adalah 0,459. Maka nilai  $R^2$  (*square*) sebesar 0,488 yang artinya bahwa Pengetahuan dan Sikap mampu menjelaskan Partisipasi Masyarakat sebesar 48,8%.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat :

Hipotesis 1 (pertama) diterima, dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu,  $5,736 > 2,030$ , maka untuk variabel independen (X1) terhadap variabel dependen berlaku hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis satu ( $H_1$ ) diterima, artinya bahwa Pengetahuan secara statistik berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat (Y).

### 2. Pengaruh Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat :

Hipotesis 2 (kedua) diterima, dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu,  $1,176 < 2,030$ , maka untuk variabel



independen (X2) terhadap variabel dependen berlaku hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis satu (H1) ditolak, artinya bahwa Sikap secara statistik tidak berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat (Y).

### 3. Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat:

Hipotesis 3 (ketiga) diterima, dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu,  $16,666 > 3,27$ , maka untuk variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen berlaku hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis satu (H1) diterima, artinya bahwa secara simultan variabel Pengetahuan dan Sikap secara statistik berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat (Y).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Secara parsial pengetahuan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.
2. Secara parsial sikap tidak berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.
3. Secara simultan pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.
4. Pengetahuan dan Sikap menunjukkan nilai *R squared* 0,488 yang artinya bahwa Pengetahuan dan Sikap mampu menjelaskan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah sebesar 48,8%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Hasyim, A., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Siskamling, (2).
- Afriyani, N. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Miskin dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
- Amini, R., Yuniati, M., & Salkiah, B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCDP-IFAD) di Kabupaten Lombok Barat, 8(1), 1–6.

- Azwar, S. (2007). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, E. dan T. P. (2010). *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Gerungan. (2009). *Psikologi Sosial*. Bandung: : PT. Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung: Humaniora.
- Ife, J. dan F. T. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isbandi, A. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP U Press.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratama, R. R., & Prasetyo, K. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Nelayan Dalam Pelestarian Mangrove Di Pantai Timur Surabaya, 57–68.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiarditha, I. K. R., Saptono, A., & Widyastuti, A. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Warga Sejahtera, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, *I*(1), 62–76.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Perda Kota Batam No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

**KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ANAK JALANAN (KAJIAN KASUS DI  
BEBERAPA DAERAH)**

**Riko Riyanda**  
*Universitas Putera Batam*

**Abstract**

This paper is about street children's problem in some areas in Indonesia such as in Bandung, Makassar, Batam, and Jogjakarta. The problems of street children should be paid serious attention by the central government as well as local government. These problems are caused by inequality of access to economic and education. It will lead to poverty, urbanization, and unemployment. Therefore, some ways out are needed to run by government and social foundations or any community. Among four cities, each city has different problems and different way in handling the problems. Appropriate policies and guidance programs are some ways to overcome the problems which are implemented precisely and sustainable. However, social foundations and any community hands are also needed to solve the problem of street children.

*Keywords: Policy, Guidance Program, Street Children*

**Pendahuluan**

Tulisan ini membahas tentang kebijakan dan program pembinaan anak jalanan (Kajian Kasus beberapa daerah di Indonesia. Salah satu masalah sosial yang terkait dengan kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial adalah masalah anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangnya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Menurut pakar pemerhati sosial Nurhadjmo keberadaan anak jalanan merupakan fenomena yang jamak ditemui di negara-negara yang sedang berkembang.

Pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya anak jalanan. Ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan rendahnya aksesibilitas pendidikan menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan di perkotaan. Anak jalanan merupakan kaum marginal perkotaan yang teralienasi dan tersubordinasi dari kemegahan kota. Mereka sangat berpotensi mendapat perlakuan yang diskriminatif seperti perlakuan secara semena-mena oleh petugas atau dari sesama anak jalanan yang lebih besar, terjerumus minuman keras, obat-obatan, kekerasan fisik, terserang penyakit menular, pelacuran sampai pada eksploitasi dan pemaksaan seksual. (Yudiatmaja, 2013: 1).

Senada dengan argumen Nurhajadmo, pakar pemerhati sosial Ricardo Capelo mengatakan keberadaan anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganannya dilakukan secara holistik mengacu pada visi atau *grand design* pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan (Indra Gunawan, 2014: 1).

Fenomena merebaknya anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota-kota besar di Indonesia cenderung meningkat ditandai dengan munculnya pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasny arus infomasi dan urbanisasi. Sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban dari Pemerintah di berbagai daerah. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayananan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sebagian besar anak jalanan yang ada di daerah berasal dari daerah lain sehingga jumlahnya sulit dikontrol. Keberadaan anak jalanan cukup banyak dieksploitasi oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kapasitas sarana dibandingkan dengan jumlah anak jalanan menjadi kendala pembinaan anak jalanan selama ini. Sehingga pembinaan terhadap setiap anak jalanan hanya bisa dilakukan beberapa kali saja, selanjutnya dilepas kembali. Kendala lainnya dalam penanganan anak jalanan adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka

meski sudah berkali pelatihan keterampilan. Akibatnya, anak jalanan itu tetap kembali ke jalan setelah selesai menjalani pembinaan (Nuraisyah, 2014).

### **Pemahaman Definisi Anak Jalanan**

Secara khusus anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal dijalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat terlarang. (“Pengertian Anak Jalanan,” 2016)

Anak jalanan dapat dipahami sebagai anak yang karena sebab-sebab tertentu masuk ke dalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Anak jalanan merupakan bagian dari komunitas kota, mereka menyatu dengan kehidupan jalanan kota, dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi maupun sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu ciri kehidupan perkotaan terutama kota-kota besar, sehingga hampir tidak ada kota tanpa anak jalanan. Salah satu sektor pekerjaan informal yang digeluti anak jalanan saat ini adalah sebagai pengemis, mengumpulkan barang-barang bekas dan menjual koran di jalanan yang semakin marak berkembang di kota-kota besar.

Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Perkembangan kehidupan anak jalanan di perkotaan, keberadaannya sangat identik dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan. Mereka mencari kebutuhan hidupnya di tempat-tempat umum sebagai pengemis, penjual koran dan mencari barang-barang bekas untuk dijual ssebagai mata pencarian mereka dalam menghidupi diri mereka dan keluarganya.

Mereka telah mengabaikan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan mental, padahal mereka adalah anak-anak bangsa yang telah dijamin oleh negara sebagai aset bangsa dan sumber daya manusia masa depan. Akan tetapi karena

mereka juga aset keluarga maka mau tidak mau harus ikut bekerja pada sektor informal demi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam pengertian ini penting digaris bawahi kata anak pada istilah anak jalanan sebagai dasar pemahaman tentang permasalahan mereka. Dengan menempatkan anak jalanan pada konteks anak, maka permasalahan anak jalanan dapat dicermati dari sejumlah hak yang semestinya diperoleh anak pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada bab 2 pasal 2 disebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah melahirkan
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut yang diatur dalam undang-undang menunjukkan secara tegas bahwa setiap anak yang dijamin oleh negara. pemenuhan akan hak-hal konstitusional tersebut merupakan bagian dari amanah konstitusi negara yang dibebankan kepada pemerintah untuk mengatasinya.”

### **Karakteristik Anak jalanan**

Menurut penerlitan Depaertemen sossial dan UNDP do Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2002:2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

1. Anak jalanan yang hidup dijalan dengan kriteria:
  - Putus hubungan atau lama tidak lama ketemu dengan orang tuanya

- 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur
  - Tidak lagi sekolah
  - Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria:
- Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
  - 8-16 jam berada di jalanan
  - Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua/saudara umumnya di daerah kumuh
  - Tidak lagi sekolah
  - Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu
  - Usia rata-rata di bawah 16 tahun
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria:
- Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
  - 4-5 jam bekerja di jalanan
  - Masih bersekolah
  - Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
  - Usia rata-rata di bawah 14 tahun
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun dengan kriteria:
- Tidak lagi berhubungan /berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
  - 8-24 jam bekerja di jalanan
  - Tidur di jalanan atau di rumah orang tua
  - Sudah tamat SD atau SLTP, tapi sudah tidak bersekolah lagi
  - Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dll.

## **Prototipe Permasalahan Anak Jalanan Di Berbagai Daerah Di Indonesia**

### **1. Kota Bandung**

Penelitian yang dilakukan oleh Sr.Tjahjorini, Margano Slamet, Pang S.Asngari dan Djoko Susanto tentang Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah Di Kota Bandung. Penelitiannya ini dilatarbelakangi anak-anak menghabiskan waktunya di jalan atau di tempat umum lainnya. Pemerintah melalui departemen sosial mengembangkan program rumah transit yang mengcover bimbingan sosial bagi anak jalanan, tetapi keuangan tidak mengcover semua anak-anak.

Banyak anak-anak yang masih di jalanan karena mereka di luar kontrol dan mudah terjebak dengan kenakalan remaja. Penelitian ini mencoba untuk memahami persepsi anak-anak di bimbingan sosial proram rumah transit. (Tjahjorini, Slamet, S.Asngari, & Susanto, 2005)

Penerlitan ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif serta menganalisa non parametik statistik. Bandung merupakan lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dimana kota ini merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki masalah anak jalanan. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak umur 6 –18 tahun. Teknik sampling statistik random digunakan terhadap 60 koresponden. Data dikumpulkan melalui jadwal wawancara, obervasi lapangan dan studi kasus.

Sejauh ini belum ada kepastian seluruh anak jalanan di Indonesia. Perkiraan yang didasarkan pada data gelandang dan pengemis, sedikitnya terdapatnya 50 ribu orang anak jalanan. Kasus yang terjadi di Kotamadua Bandung memperlihatkan jumlah anak jalanan mencapai 11.000 orang. Namun tidak semua dari jumlah tersebut menerima bimbingan sosial sehingga masih banyak anak jalanan yang bersifar lair karena tidak ditangani oleh rumah singgah atau lembaga-lembaga yang menangani anak jalanan, sehingga mereka cenderung rawan terhadap tindakan yang menentang norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Menyadari hal ini, maka diperlukan upaya penanganan permasalahan anak jalanan yang salah satunya dilakukan melalui rumah singgah yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan pembina rumah singgah yang bertindak sebagai agen perubahan yang juga bertindak sebagai penyuluh yang berupaya menolong agar orang tersebut dapat menolong dirinya sendiri atau “help people to help themselves”. Namun demikian ada keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani anak jalanan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Bandung adalah Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki kapasitas menangani proyek berskala besar karena sekalipun kemauan membantunya sangat besar, namun jumlah stafnya minin dan mereka juga sering kali tak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani masalah anak jalanan. Karenanya jika tidak ada kerjasama antara lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah maka akan mengakibatkan karya lembaga swadaya masyarakat seringkali terlalu kecil untuk terasa manfaatnya bagi masyarakat luas.



Keterbatasan kemampuan tersebut, sedikit banyak akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan. Padahal bila mengingat rumah singgah memiliki pembina yang dipandang sebagai agen perubahan sekaligus sebagai penyuluh, diharapkan kondisi tersebut tidak terjadi.

Benang merah dari hasil penelitiannya adalah persepsi responden terhadap program bimbingan sosial negatif dalam hal fisik, mental, sosial dan skill. Responden yang terlibat dalam program ini kurang atau sama dengan 6 bulan lebih baik dari yang dilibatkan 7-12 bulan atau lebih dari 13 bulan, terutama dalam hal bimbingan mental dan skill. Berdasarkan temuan reorientasi program dibutuhkan melalui bentuk bimbingan dan paket konsling dalam waktu yang singkat kurang dari 6 bulan. Relevansi ketertarikan dan kemampuan pengembangan skill anak-anak tetapi tidak fokus pada fisik, mental dan pengembangan sosial.

## **2. Kota Makassar**

Penelitian yang dilakukan oleh Ronawati Anasiru yang berjudul implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali faktor pendukung dan penghambat model-model kebijakan penanganan serta mencari alternatif penanggulangan untuk menjangkau hasil yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan model studi kasus.

Dari analisis hasil penelitian didapatkan gambaran bahwa implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya digunakan empat model pendekatan yakni: (1) Model pendekatan berbasis panti sosial atau *institutional based services*, (2) Model pendekatan berbasis keluarga atau *family based services*, (3) Model pendekatan berbasis masyarakat atau *community based services* dan (4) model pendekatan berbasis semi panti sosial atau *half-way house services*. Adanya *political will* dan kemauan keras serta keseriusan Pemda Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar untuk menjadikan Makassar menjadi kota yang aman, tertib dan bebas dari anak jalanan, yang penanggulangannya dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model pendekatan di atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pemerintah dan

swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. (Anasiru, 2011)

Dalam Penelitiannya tersebut mendeskripsikan saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terjadi di Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Saat ini Kota Makasar berkembang pesat, bangunan fisik, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Terjadi penggusuran liar dan pasar tradisional. Urbanisasi pencari kerja sektor informal, buruh dan tukang becak dari kabupaten lain makin meningkat. Kondisi ini memberi indikasi makin meningkatnya keluarga miskin dan anak yang turun ke jalanan untuk mencari nafkah. Kemiskinan masih merupakan masalah besar, kurang lebih 71.624 kk/368.124 jiwa atau 28,1% penduduk miskin. Kota Makasar menjadi sumber penyebab utama dari permasalahan anak jalanan, di samping itu mentalitas karakter masyarakat untuk memanfaatkan charity (belas kasihan) yang menciptakan perilaku anak jalanan. Kebiasaan perilaku masyarakat pengguna jalan yang memiliki solidaritas tinggi terhadap permasalahan kemiskinan menjadi peluang penghasilan bagi anak jalanan dan keluarga/orang tuanya.

Hasil penelitian Balai Besar Pendidikan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2006, isu anak jalanan di Kota Makasar bukan saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor budaya. Mereka anak jalanan mulai melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini nampak pada perilaku anak jalanan yang berusaha mendapatkan uang untuk digunakan bermain judi, minum minuman keras dan merokok, anak jalanan ini mulai terkontaminasi perilaku orang dewasa (preman jalanan).

Di samping itu anak-anak yang terjun sebagai pekerja informal tersebut, bukan karena miskin semata, akan tetapi lebih pada persoalan mentalitas, mereka tidak memiliki semangat atau motivasi memikirkan masa depannya, mereka mudah terpengaruh ajakan orang dewasa untuk dieksploitasi menjadi pengemis. Bahkan dalam usia yang masih belia mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dewasa ini. selain itu orang tua mereka belum berperan penting dalam berkembangnya mentalitas anak jalanan sehingga kehidupannya menjadi semakin terpuruk. Suatu isu yang menarik tentang permasalahan anak jalanan di Kota Makasar adalah adanya oknum yang mengkoordinir anak jalanan. Oknum ini di lingkungan anak

jalanan disebut “BOS” atau KOMANDAN. Oknum inilah yang merekrut anak-anak dan orang tuanya untuk menjadi pengemis.

### **3. Kota Batam**

Di Kota Batam pusat rehabilitasi dan rumah singgah bukankah solusi mengatasi masalah anak jalanan. Permasalahan anak jalanan tidak akan selesai hanya dengan membangun banyak rumah singgah dan rehabilitasi, karena anak jalanan hanyalah hasil dari sekian banyak persoalan sosial kemiskinan, ketiadaan lapangan pekerjaan, dan masalah-masalah lain menyusul meningkatnya urbanisasi di Kota Batam. Begitu pula program dan upaya pemerintah dalam menghilangkan anak jalanan hanya menjadi slogan saja. Penyebabnya kepedulian dan keberadaan rumah singgah sendiri di Batam sangat minim dan kurangnya pendampingan yang intensif terhadap permasalahan anak jalanan. (Haluankepri.com, 2010)

Seperti keberadaan pusat rehabilitasi panti berlokasi di daerah Sambou, Nongsa yang dibangun Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam. Tempat ini rencanya akan dijadikan penampungan/pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). Baik anak jalanan maupun gepeng yang terazia pihak dinsos dan satpol PP akan dibina dengan diberi keterampilan berupa sablon, perbengkelan dan wirausaha kecil. Hanya saja hingga saat keberadaan rehabilitasi ini belum maksimal digunakan, lantaran pihak Dinsos terkendala personel dan biasa operasional.

Masalah anak jalanan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial saja yang ikut berperan, melainkan cukup banyak aktifis dan yayasan merasa ikut andil bertanggung jawab dalam pembinaannya. Salah satu contoh upaya dilakukan rumah singgah milik Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) Batam yang berlokasi di kampung utama. Sudah sejak lama mereka membina para anak jalanan ini, bahkan hingga disekolahkan segala.

Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) setiap tahunnya selalu mendata anak jalanan dan kurang mampu untuk diberikan beasiswa sekolah. Saat ini YPAB sendiri telah mempunyai 180 orang anak asuh yang dibawah asuhan rumah singgah YPAB. Dalam mengelola anjal ini YPAB sendiri banyak sekali menerima bantuan dari pihak swsta baik dari dalam mapun luar negeri. Untuk bantuan dari luar negeri YPAB menerima bantuan dari Singapore Club dan dari Belanda.

Berita tersebut dipublikasikan pada tahun 2010, di tahun 2016 sendiri pemerintah Kota Batam telah mendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di

Kota Batam. Dari data tersebut terlihat berapa jumlah anak terlantar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari tersebut mencerminkan jumlah anak terlantar di Kota Batam mengalami penurunan yang signifikan jumlahnya. Pada tahun 2012 jumlah anak terlantar berjumlah 1.943 mengalami penurunan drastis sampai pada angka 109 di tahun 2015.

Data Jumlah PMKS dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1.** Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam

Jumlah PMKS yang ada		2011	2012	2013	2014	2015
A	Wanita Tuna Susila	2676	2621	2621	1867	2157
B	Waria	536	522	522	483	266
C	Paca	566	566	324	809	809
C.1	Paca yang diberi bantuan	N/A	60	56	0	0
D	Eks Paca kronis	0	0	0	0	0
E	Pekerja Migran	233	312	118	0	0
E.1	Pekerja Migran yang diberi bantuan	63	125	118	118	139
F	Keluarga Veteran	29	29	19	19	0
<b>G</b>	<b>Anak Terlantar</b>	<b>0</b>	<b>1943</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>109</b>
G.1	Anak terlantar yang diberi bantuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H	Orang Gila	37	50	0	0	50
I	Lansia/ Miskin	936	600	600	600	600
J	Gepeng	261	250	50	250	150
K	Korban Bencana	52	0	94	170	315
K.1	Korban bencana yang diberi Bantuan	1150	650	1000	3286	1800
L	Koms Adat Terpencil	612	0	612	7	7
M	Rumah Tak Layak Huni	3000	696	696	1714	898
M.1	RTHS yang direnovasi	100	300	696	816	747
N	Eks Korban Napza	0	0	0	0	0
O	Eks Napi	0	92	0	0	0
P	Wanita Rawan Sosial	286	286	539	0	0
Jumlah Total PMKS yang ada		8991	6135	29074	10918	8028

Jumlah Total PMKS yang tertangani	1113	1135	1870	5968	3017
<b>Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>14.60</b>	<b>18.50</b>	<b>6.43</b>	<b>54.66</b>	<b>37.58</b>

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

#### 4. Kota Yogyakarta

Dalam penelitian Aminatun (2007) dalam (Clara R.P. Ajisukmo, 2012) penelitiannya di Yogyakarta yang mengkaji Pengaruh Kebutuhan Dasar Yaitu Kebutuhan Fisik, Psikis, dan Sosial pada Anak Jalanan yang Tinggal Bersama Orang tua dan yang Tidak Tinggal Bersama Orang Tua. Hasil penelitiannya menjumpai bahwa anak jalanan yang tinggal bersama orang tua dapat memenuhi kebutuhan dasarnya lebih baik dari pada anak jalanan yang tidak bersama orang tua mereka. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan yang tinggal dengan orang tua perlu dibedakan dari anak jalanan yang tidak tinggal dengan orang tua.

Dalam penelitian ini kebutuhan dasar fisik mencakup kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Kebutuhan psikis termasuk kualitas hubungan dengan orang tua, kesempatan beribadah, kasih sayang dari orang tua dan respon dari orang tua ketika anak dalam keadaan sakit. Sedangkan kebutuhan sosial mencakup kesempatan bermain dengan teman sebaya, hubungan dengan teman di lingkungannya, dan kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Dari penelitian-penelitian tersebut di atas ditunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidak hadirannya orang tua merupakan malapetaka bagi anak. Oleh karena itu upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak dari keluarga miskin, bukan hanya penting bagi anak dan keluarga saja. Lebih dari pada itu, upaya perlindungan kepada anak-anak dari masyarakat miskin merupakan upaya untuk menyelamatkan suatu bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan dan dukungan kepada anak miskin adalah program pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada umumnya anak yang berasal dari keluarga miskin sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Misalnya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No.73 tahun 1993, tentang program paket A dan B. Anak yang putus sekolah dasar dapat mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk kemudian memperoleh ijazah yang disetarakan dengan tingkat sekolah dasar untuk program paket A, dan ijazah sekolah menengah pertama untuk program paket B.

Bukti lain dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan untuk anak yang putus sekolah dan yang membutuhkan perlindungan khusus adalah dengan mencanangkan wajib belajar 9 tahun dengan diungkapkannya UU Sisdiknas pada tahun 2003, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 sebagai upaya percepatan program wajib belajar 9 tahun (Departemen Pendidikan Nasional 2009). Namun demikian dalam kenyataannya berbagai paket kebijakan sehubungan dengan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin masih belum mapu mengangkat derajat kehidupan dan melindungi mereka.

Program paket A dan paket B yang merupakan program pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, dalam kenyataannya masih belum banyak dimanfaatkan. Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi rendahnya minat anak-anak putus sekolah untuk mengikuti program paket A dan B adalah tidak mudahnya pengakuan kesetaraan ijazah yang dikeluarkan dari program paket A dan B oleh sekolah formal. Ajisukmo (2009) dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa program pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (termasuk di dalamnya pekerja anak dan anak jalanan), kurang menarik dan tidak relevan dengan minat, kebutuhan dan karakteristik mereka, misalnya mobilitas anak jalanan yang tinggi dan waktu yang tersedia untuk belajar bagi pekerja anak. Selain itu, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, maka pendidikan luar sekolah yang dirancang dan diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak cukup bervariasi sehingga tidak cukup optimal dalam memfasilitasi perkembangan kemampuan dan keribadian anak jalanan dan pekerja anak di Yogyakarta.

## **SIMPULAN**

Kebijakan dan program anak jalanan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Makassar, Bandung dan Yogyakarta merupakai mata rantai dari persoalan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, akses pendidikan yang tidak adil di Kota Besar. Persoalan anak jalanman di BeberpaKota Besar menjadi masalah pelik yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. karena kebijakan dan program pembinaan anak jalanan mampu memutus mata rantai kesadaran, morah dan menghindari anak jalanan terjun ke dalam arena lingkungan kriminalitas atau pergaulan yang salah. Model kebijan dan program yang dilakukan oleh Kota Bandung, Makassar, Batam dan Jogya adalah solusi agar eksploitasi terhdapa anak jalanan dapat dikurangi ssecara sistematis. Keberhsila angkaan penurunan anak jalanan di Kota Besar seperti di di Batam dan Bandung tersebut tidak lepas dari model kebijakan dan program yang

tepat terhadap pembinaan anak jalanan. Namun bukan berarti anak jalanan tidak lepas dari permasalahan sosial yang jika tidak dilakukan pembinaan secara berkala maka permasalahan anak jalanan akan terus ada dan meresahkan masyarakat apalagi sudah mengarah pada pemerasan dan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Secara garis besarnya dari permasalahan anak jalan di berbagai kota tersebut yang menjadi kunci pembinaan anak jalanan adalah adanya kemauan dan political will dari pemerintah dengan anggaran yang memadai dan program pembinaan pendidikan yang melahirkan skill dan keterampilan sehingga anak jalanan bukan lagi hidup di jalanan tapi memikirkan masa depan yang jauh lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, R. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosioekonsepia*, 16(02), 175–186.
- Apit Sekar Setyadani. (2013). Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Anak Jalanan Dengan Seks Aktif di Kota Semarang. *Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 30–36.
- Clara R.P. Ajiuksmo. (2012). Faktor-Faktor Penting Dalam Merancang Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Anak Jalanan dan Pekerja Anak. *Makara, Sosial Humaniora*, 16(1), 36–48.
- Haluankepri.com. (2010). Tak Cukup Hanya Rehabilitasi dan Rumah Singgah Saja.
- Indra Gunawan. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*. Bengkulu.
- Nuraisyah, fisipol2014. blogspot. co. (2014). Kehidupan Anak Jalanan di Kota Batam.
- Pengertian Anak Jalanan. (2016). Retrieved July 24, 2016, from Pengertian-

[menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-jalanan-menurut-ahli.html?m=1](http://menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-jalanan-menurut-ahli.html?m=1)

Tjahjorini, S., Slamet, M., S.Asngari, P., & Susanto, D. (2005). Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah Di Kota Madya Bandung. *Penyuluhan, 1*(1).

Yudiatmaja, W. E. (2013). Ekonomi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Jalanan di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1*(1), 1–8.



## **POTENSI UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DAERAH**

**Hari Susanta Nugraha, Rabith Jihan Amaruli, dan Darwanto**  
*Universitas Diponegoro*

### **Abstract**

Unit Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a business unit that provides a positive impact on the economy and the artery of the regional and national economy. MSMEs products was considered to serve as a flagship product in international trade. However, there are still some MSMEs's products such as products of creative MSME and tourism that needs to be given special attention related to product development of MSME. The purpose of this study was to analyze the potential uniqueness, local knowledge and institutions in the development of MSME products based creative economy and tourism. The analytical method used is a qualitative descriptive analysis method using Strength, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis based on data derived from the results of in-depth interview with key person who manage the tourism destination. The results show that the identification of strengths, weakness, opportunities and threats MSME products based creative economy and tourism so that it can be used as a reference in formulating strategies and models of strengthening the MSMEs products that require an active role of government and local communities to participate in the development of MSMEs based creative economy and tourism and the role of institutions is one of the most important things in the development of MSMEs based creative economy and tourism.

**Keywords :** *MSME, Creatives Economy, Tourism, Institutions*

### **Pendahuluan**

Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang menjadi urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Produk-produk UMKM dapat dijadikan sebagai produk andalan untuk diperjualbelikan pada perdagangan internasional seperti produk hasil pertanian, produk tekstil, produk kerajinan, serta produk lain yang berasal dari potensi lokal. Produk UMKM adalah produk yang berpotensi untuk dikembangkan secara kreatif dan inovatif sehingga kualitas produk UMKM dapat meningkat dan bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Selain adanya produk-produk UMKM hasil olahan potensi lokal, terdapat pula potensi alam lokal yang memiliki keanekaragaman kesenian dan budaya dengan ciri khas tertentu seperti adanya peninggalan

keperbakaan fisik. Potensi alam lokal tersebut dapat dipamerkan dan dijadikan sebagai suatu destinasi wisata yang menarik.

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan sementara dari satu tempat menuju tempat lain dengan tujuan untuk mengistirahatkan fisik maupun mental setelah melakukan pekerjaan dan kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan keluarga (Spillane,1993). Wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata akan menimbulkan adanya interaksi dengan masyarakat lokal sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan ada proses pengenalan kebudayaan lokal(Spillane , 1994). Kebudayaan tersebut membentuk suatu kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal menurut Kongprasertamorn (2007) meliputi : 1) adanya ajaran tentang nilai moral dan budaya, 2) adanya ajaran tentang kecintaan terhadap alam, dan 3) adanya pengaruh leluhur/tetua dari suatu kelompok masyarakat.

ASEAN telah menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal pada tahun 2015. Hal tersebut berdampak pada adanya arus bebas barang, jasa dan modal, investasi, serta bebasnya sumber daya manusia yang terampil diantara Negara ASEAN. Hal tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia yaitu terbukanya peluang untuk meningkatkan pangsa pasar di kawasan ASEAN. Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia menjadi hal penting yang harus diutamakan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ( *ASEAN Economic Community, MEA/AEC*) karena UMKM selama ini telah berupaya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan domestik negara dan mampu mengurangi kemiskinan UMKM dan pariwisata sebagai sektor industri yang diharapkan untuk mampu mempertahankan nilai-nilai positif yang telah ada dan kualitas dalam unit usaha (Indarti dan Anton, 2014).

## **Tinjauan Pustaka**

### **Industri Kreatif**

Menurut Departemen Perdagangan RI , Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu/kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdayakan kreasi dan daya cipta individu/kelompok tersebut. Ruang lingkup ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan juga mengidentifikasi sektor-sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu: 1) Periklanan; 2) Arsitektur; 3) Pasar Barang Seni; 4) Kerajinan (handicraft); 5) Desain; 6) Fashion; 7) Film, video, dan fotografi; 8) Permainan interaktif; 9) Musik; 10) Seni pertunjukan; 11) Penerbitan dan percetakan; 12) Layanan komputer dan piranti lunak; 13) Radio dan Televisi; dan 14)

Riset dan Pengembangan. Ekonomi kreatif cenderung bertumpu pada kualitas sumber daya manusia sedangkan industri manufaktur cenderung terhadap memiliki orientasi pada kuantitas produk sehingga ekonomi kreatif lebih banyak muncul di kelompok industri kecil menengah (Departemen Perdagangan, 2007)

### **Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata**

Spillane (1993) menyatakan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan perorangan maupun kelompok ke suatu tempat dengan sementara untuk mencari keserasian atau keseimbangan serta kebahagiaan dalam dimensi sosial, budaya, alam, serta ilmu. Spillane mengelompokkan tujuan individu/kelompok berwisata antara lain yaitu menikmati perjalanan, menghabiskan waktu bersama keluarga, urusan usaha dagang, dan lainnya. Pengembangan pariwisata adalah segala bentuk kegiatan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta meningkatkan layanan sarana dan pra-sarana, berupa barang atau jasa serta fasilitas. Hal tersebut dikategorikan sebagai kegiatan kompleks karena kegiatan tersebut mengkoordinasikan antara kegiatan, sarana dan pra-sarana, objek dan daya tarik, fasilitas penunjang, sarana lingkungan dan sebagainya dengan wisatawan (Soemarwoto, 1993).

### **Unsur Budaya, Sejarah, dan Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata**

Budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu pilihan strategi budaya untuk mengurangi dampak adanya globalisasi dan mampu menjadi *counter culture* dominasi budaya negara-negara maju yang berdampak besar terhadap pola pikir dan “budaya” masyarakat negara-negara berkembang. Kebudayaan merupakan kompleks yang mencakupi kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, pengetahuan, kesenian, dan kemampuan dan kebiasaan yang telah diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat di suatu wilayah. Kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan yang diwariskan dari generasi sebelumnya ataupun pengalaman yang terkait dengan masyarakat serta lingkungan suatu komunitas pada suatu tempat dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh suatu komunitas.

Kearifan lokal diartikan pula sebagai suatu tindakan positif saat berinteraksi dengan alam dan kondisi lingkungan sekitar dimana terbentuk dari suatu nilai adat dan agama, serta pengaruh leluhur atau budaya lokal yang membangun suatu komunitas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Vitasurya, 2016). Budaya lokal memiliki peran dan potensi sebagai *counter culture* yang berbeda dari dominasi budaya global yang telah ada (Fakih, 2003). Hidayat dalam Kencana (2010) menyatakan bahwa sejarah adalah representasi dari peradaban bangsa. Pengembangan wisata sejarah dengan memberdayakan

elemen dan lanskap sejarah sebagai objek wisata merupakan salah satu cara atau bentuk pelestarian elemen dan lanskap sejarah itu sendiri. Selain itu, keberhasilan pengembangan wisata juga perlu ditunjang faktor-faktor seperti atraksi/objek wisata, transportasi, wisatawan, fasilitas pelayanan, informasi dan promosi, serta kebijakan dan program pemerintah.

### **Kelembagaan**

Kelembagaan dijelaskan Yeager dalam Yustika (2006) sebagai suatu aturan main mencakup regulasi yang menjadikan masyarakat saling berinteraksi. Kelembagaan berdasarkan bentuknya oleh North dalam Syarif (2013) dibagi menjadi dua yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal merupakan kelembagaan yang berada di kalangan masyarakat umum dan tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi dan kesepakatan. Sedangkan kelembagaan yang ditunjukkan oleh peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*aggrements*) tertulis, perjanjian kontrak dan peraturan tertulis yang berlaku pada tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional disebut sebagai kelembagaan formal.

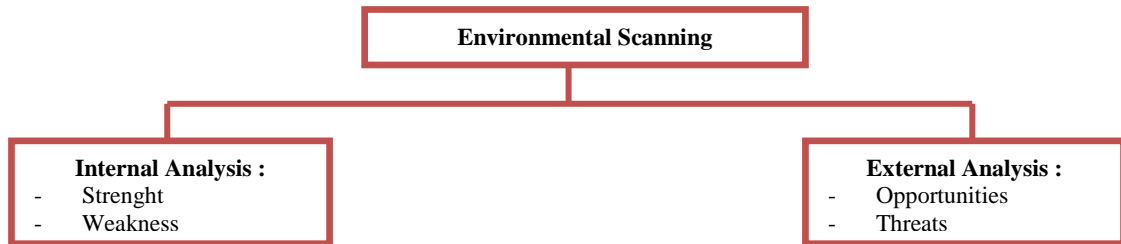
### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats* (SWOT) dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data primer yang dikumpulkan dengan cara observasi secara langsung dan hasil *indepth interview*. Metode analisis SWOT merupakan metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pada suatu unit usaha dengan melihat kondisi unit usaha sebelum terjadi permasalahan dan membantu merumuskan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada (Ommani, 2011). Kerangka dan matriks analisis SWOT ditunjukkan pada Gambar 1.

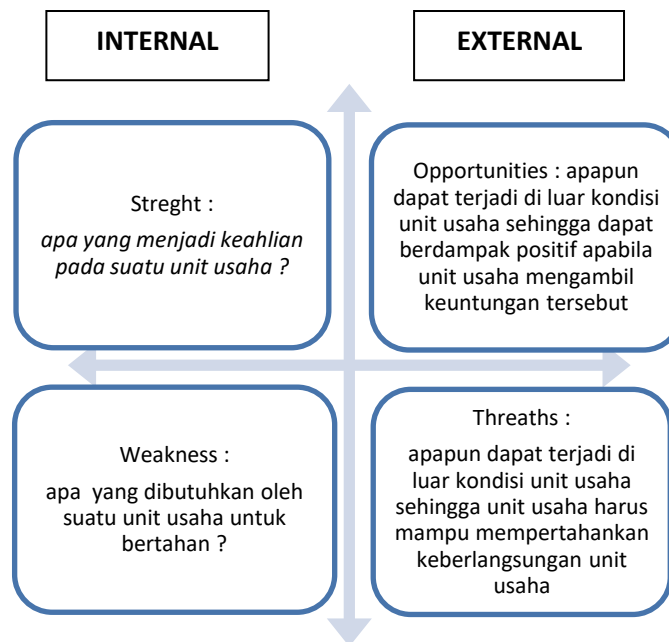
**Gambar 1.**

**SWOT Analysis Framework and SWOT Analysis Matrix**

a) *SWOT Analysis Framework*



b) *SWOT Analysis Matrix*



Sumber : Osita, dkk (2014).

**Hasil Dan Pembahasan**

**Analisis SWOT UMKM Kreatif dan Wisata Berbasis Kearifan Lokal.**

Secara umum UMKM kreatif dan wisata mengandalkan potensi keunikan dan kearifan lokal untuk upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian wilayah setempat. Potensi keunikan dan kearifan lokal tersebut dapat meliputi :1) alam (pantai, gunung, goa, sungai, danau); 2) bangunan, benda, dan lokasi bersejarah (monumen, gedung, tempat ibadah, candi, peralatan perang, prasasti, patung, fosil, artefak, kota dan desa

bersejarah); 3) kuliner (makanan dan minuman tradisional); 4) budaya lokal (ritual adat, upacara adat, permainan tradisional); 5) busana lokal (pakaian adat dan motif kain); 6) seni pertunjukan (tarian, sastra, film, cerita rakyat, dan pewayangan); dan 7) seni visual (lukisan, ornamen, dan relief).

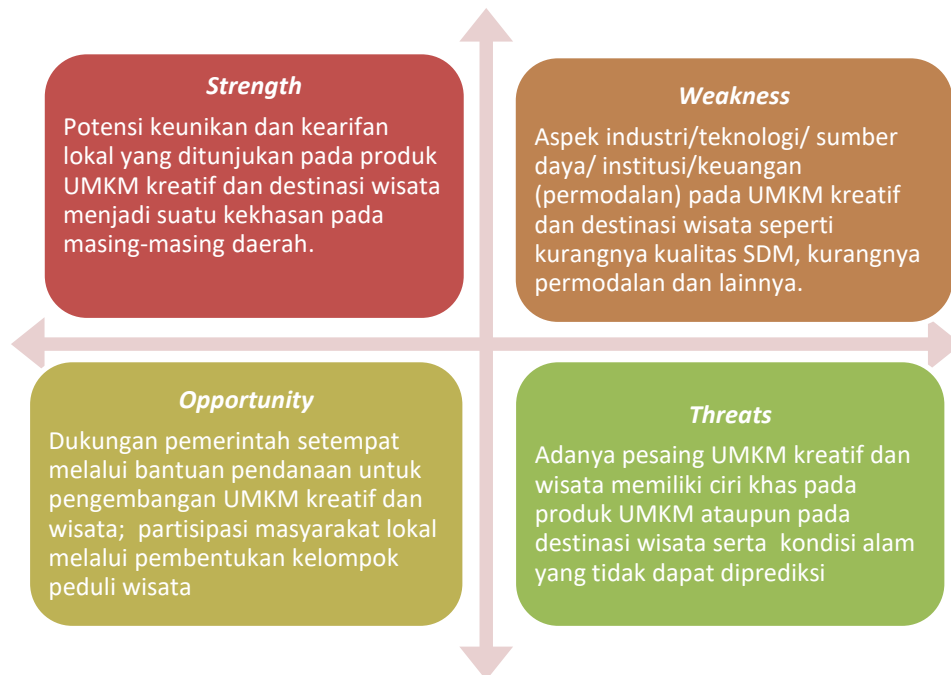
Pengembangan UMKM Kreatif dan wisata masih terdapat permasalahan. Permasalahan-permasalahan ditinjau dari aspek industri, teknologi, sumber daya, institusi, dan keuangan/permodalan secara umum meliputi kurangnya promosi umkm kreatif dan wisata lokal, kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola umkm kreatif maupun wisata lokal, rendahnya permodalan dan adanya permasalahan keuangan dalam umkm kreatif dan wisata lokal, kurangnya dukungan pemerintah setempat untuk pengembangan umkm kreatif dan wisata lokal, masih belum dipergunakannya peralatan teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam UMKM kreatif. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada UMKM kreatif dan wisata berbasis kearifan lokal tersebut dapat dikurangi dengan adanya dukungan pemerintah setempat dalam upaya pengembangan dan pembangunan UMKM kreatif dan wisata lokal berupa bantuan dana dari pemerintah untuk pembiayaan operasional kegiatan kebudayaan, pemberian stimulan kepada komunitas pegiat seni dan budaya, pengadaan diskusi bersama antara pemerintah dengan pelaku UMKM kreatif dan wisata dan kemudahan dalam perijinan. Selain itu pula adanya partisipasi masyarakat lokal dapat membantu keberlangsungan UMKM kreatif dan wisata lokal.

Permasalahan UMKM kreatif dan wisata lokal apabila tidak mendapat perhatian maka akan menjadi kelemahan pada UMKM kreatif dan wisata lokal sehingga pengembangan UMKM kreatif dan wisata lokal dikhawatirkan dapat terhambat oleh pesaing. Selain itu ancaman/hambatan lain yang tidak dapat diprediksi khususnya pada destinasi wisata berbasis potensi alam adalah adanya bencana alam dan siklus musim yang mengalami perubahan.

Potensi dan kelemahan merupakan faktor internal yang dijadikan acuan dalam analisis faktor strategi internal sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal yang dijadikan acuan pada analisis faktor strategi eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang bersangkutan dengan kondisi yang terjadi di dalam UMKM kreatif dan wisata yang berupa keuangan, operasional, sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, budaya serta pemasaran dalam unit usaha sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar UMKM kreatif dan wisata yang berupa ekonomi, lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, politik, hukum, teknologi,

kependudukan, dan sosial budaya. Kedua faktor tersebut mempengaruhi UMKM kreatif dan wisata dalam pengambilan keputusan (Zohratun, 2013). Potensi, kelemahan, peluang dan ancaman UMKM kreatif dan wisata yang telah dipaparkan tersebut diringkas dalam bentuk Matriks SWOT yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi pengembangan dan pembangunan UMKM kreatif dan wisata lokal dalam jangka panjang.

**Gambar 1. MatriksSWOT UMKM Kreatif dan Wisata Berbasis Kearifan Lokal.**



Sumber : data diolah, 2016.

SWOT UMKM kreatif dan wisata berbasis kearifan lokal tersebut apabila dijabarkan berdasarkan beberapa UMKM kreatif dan wisata di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kota Solo dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan Objek Wisata Colo, Kabupaten Kudus.

Analisis SWOT kawasan objek wisata Colodi Kabupaten Kudus dijelaskan sebagai berikut : 1) *Strength* meliputi adanya potensi objek wisata religi dan wisata alam yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kudus khususnya Desa Colo; 2) *Weakness* meliputi kurangnya interaksi antara *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata serta kualitas SDM yang masih dinilai rendah; 3) *Opportunity* meliputi adanya dukungan masyarakat dengan upaya pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang membawahi beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok ojek, kelompok

pedagang, karang taruna dan PMPH (Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan); dan 4) *Threats* meliputi kondisi alam tepatnya pada jalanan menuju tempat wisata alam yang terjal dan turunan curam.

2. UMKM Kain Tenun Troso, Pantai Bandengan, Wisata Banteng Portugis dan Pulau Panjang, Kabupaten Jepara.

Analisis SWOT Kain Tenun Troso di Kabupaten Jepara dijelaskan sebagai berikut : 1) *Strength* meliputi proses pembuatan kain tenun secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM); 2) *Opportunity* meliputi adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengembangan kain tenun Troso; 3) *Weakness* meliputi keterbatasan modal, kurangnya tenaga kerja terampil dan tenaga kerja lokal, sistem manajemen UMKM yang masih sederhana serta tujuan pemasaran kain tenun Troso yang masih terbatas; dan 4) *Threats* meliputi pesaing pengrajin kain tenun dari daerah lainnya yang lebih variatif.

Analisis SWOT Pantai Bandengan, Wisata Banteng Portugis, dan Pulau Panjang yang merupakan destinasi wisata di Kabupaten Jepara dijelaskan sebagai berikut : 1) *Strength* meliputi adanya potensi wisata alam yang menyediakan berbagai fasilitas permainan air seperti *jetski*, *banana boat* dan lainnya serta potensi wisata bangunan bersejarah yang menyajikan keindahan bangunan bersejarah peninggalan Portugis; 2) *Opportunity* meliputi dukungan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas destinasi wisata; 3) *Weakness* meliputi fasilitas MCK yang perlu ditingkatkan pelayanan dan kebersihannya; dan 4) *Threats* meliputi kondisi alam yang bersifat musiman.

3. UMKM Batik Bakaran, Kabupaten Pati.

Analisis SWOT UMKM Batik Bakaran di Kabupaten Jepara dijelaskan sebagai berikut : 1) *Strength* meliputi ciri khas motif batik bakaran yang memiliki motif yang berbeda dengan motif batik lainnya, batik bakaran merupakan produk *handmade* masyarakat lokal Desa Juwana, Kabupaten Pati, dan para pekerja berasal dari masyarakat lokal Desa Juwana; 2) *Weakness* meliputi produk batik bakaran masih belum dikenal oleh masyarakat luas, biaya kegiatan usaha batik bakaran umumnya berasal dari biaya pribadi pemilik usaha, masih banyaknya penggunaan bahan baku import, lembaga keuangan masih belum banyak menyalurkan dana bantuan, dan teknologi masih belum mendukung proses pembuatan batik; 3) *Opportunity* meliputi keaktifan UMKM Batik Bakaran untuk mengikuti pameran-pameran UMKM yang diselenggarakan Pemerintah maupun pihak



swasta; dan 4) *Threats* meliputi pesaing produk batik dari daerah lainnya seperti Batik Solo, Batik Pekalongan dan Batik Yogyakarta dan perubahan harga bahan baku yang berasal dari luar negeri.

#### 4. Wisata Budaya, Kota Solo.

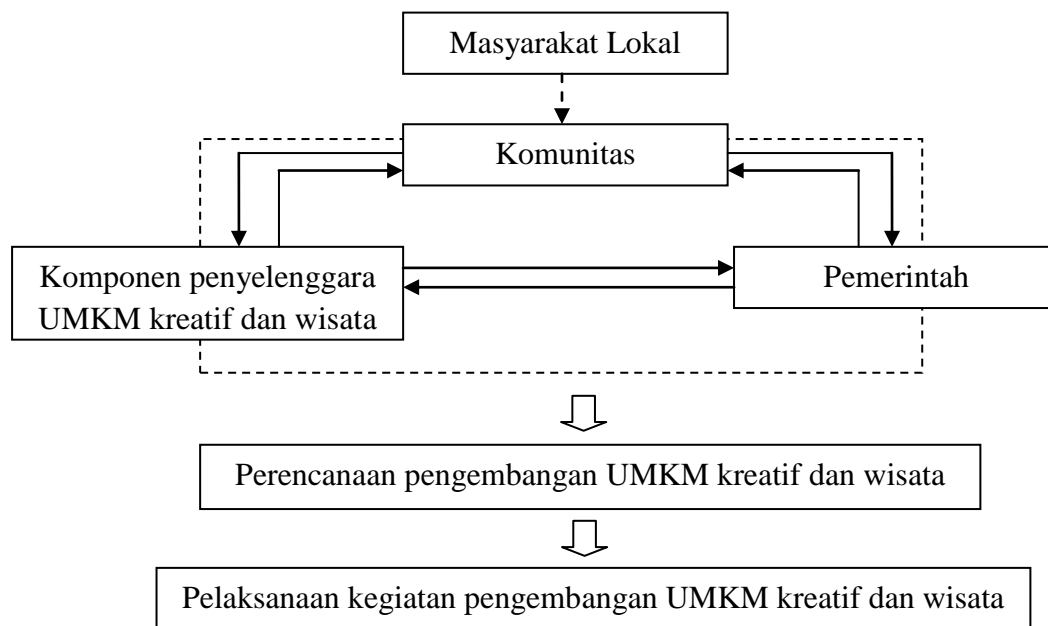
Analisis SWOT Wisata Budaya, Kota Solo dijelaskan sebagai berikut : 1) *Strength* meliputi potensi budaya lokal berupa bangunan bersejarah seperti Keraton Surakarta, Kerato Mangkunegaraan, Museum Danar Hadi dan Museum Radya Pustaka; 2) *Weakness* meliputi promosi wisata budaya Kota Solo yang masih perlu ditingkatkan; 3) *Opportunity* meliputi adanya kepedulian dan dukungan Pemerintah Kota Solo melalui bantuan dana untuk pengembangan wisata dan kebudayaan dan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan budaya dan wisata lokal; 4) *Threats* meliputi wisawatan yang cenderung menjadikan Kota Solo sebagai tempat persinggahan.

Kelembagaan pada UMKM kreatif dan wisata juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya pengembangan UMKM kreatif dan wisata. Kusuma (2015) menjelaskan pula bahwa aspek kelembagaan adalah salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam mencapai pembangunan industri pariwisata. Peranan penting adanya kelembagaan pada UMKM kreatif dan wisata ditunjukkan oleh peran aktif masyarakat melalui pembentukan dan keikutsertaan dalam kelompok-kelompok masyarakat (komunitas) yang peduli terhadap UMKM kreatif dan wisata seperti POKDARWIS (Kelompok Sadar Pariwisata) dan beberapa komunitas masyarakat lokal lain. Kelembagaan pada pengembangan UMKM kreatif dan wisata digambarkan pula pada adanya interaksi antara *stakeholder*. Schmeer dalam Danandjojo (2014) menjelaskan *stakeholder* sebagai aktor (perseorangan ataupun kelompok) yang berkepentingan dalam suatu kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Sehingga aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM kreatif dan wisata adalah komponen pemerintah, komunitas lokal, dan komponen penyelenggara UMKM kreatif dan wisata.

Interaksi antara Pemerintah, komunitas lokal dan penyelenggara UMKM kreatif dan wisata dalam upaya pengembangan UMKM kreatif dan wisata ditunjukkan pada Gambar 2. Masyarakat lokal berpartisipasi dan membentuk suatu komunitas lokal seperti POKDARWIS, kelompok dagang dan lainnya. Masyarakat lokal berperan dalam mengolah dan menghasilkan produk UMKM kreatif ataupun memelihara kearifan lokal dengan bantuan dari Pemerintah maupun bantuan dari investor. Pemerintah juga berperan sebagai motivator dan pengarah bagi komunitas lokal. Komunitas lokal bersama-sama dengan Pemerintah dan penyelenggara UMKM kreatif dan swasta merencanakan upaya-upaya pengembangan yang sesuai dengan

kondisi UMKM kreatif dan wisata yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata seperti pelaksanaan pameran produk UMKM kreatif ataupun pameran mengenai destinasi wisata lokal yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada UMKM kreatif.

**Gambar 2.**  
**Kelembagaan Pengembangan UMKM Kreatif dan Wisata**



Sumber : data diolah, 2016.

**Potensi UMKM Kreatif dan Kearifan Lokal Wisata Berbasis Budaya dan Religi.**

UMKM Kreatif dan kearifan lokal wisata yang diangkat dari budaya dan religi dapat dijadikan sebagai potensi lokal yang dapat dikembangkan sekaligus membantu upaya proteksi terhadap budaya lokal. Thoyibbi (2003) menambahkan bahwa daya tarik unsur budaya dan kearifan lokal apabila dilihat dari adanya kebijakan otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan untuk menggali serta mengembangkan budaya lokal sebagai modal sosial dan budaya pembangunan masyarakat lokal. UMKM kreatif dan wisata berbasis budaya dan religi telah dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah. UMKM kreatif dan wisata tersebut meliputi beberapa umkm kreatif dan wisata lokal yang berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kota Solo.

Kawasan Objek Wisata Colo di Kabupaten Kudus merupakan kawasan objek wisata berbasis religi dan objek wisata alam. Objek wisata religi pada kawasan objek wisata Colo meliputi Makam Sunan Muria (Syekh R. Umar Said, salah satu dari Walisanga/Wali Sembilan) dan objek wisata religi Makan Sunan Kudus yang berada di Masjid Menara Kudus. Makam Sunan Muria dan Makam Sunan Kudus yang terdapat di Kabupaten Kudus ini

dijadikan suatu objek wisata dikarenakan adanya kepercayaan wisatawan terhadap adanya roh pendahulunya dan selain itu pula dalam religi terdapat hubungan antara keberagaman tradisi, kemajemukan, dan perbedaan budaya. Masyarakat yang berada di kawasan objek wisata Colo banyak dipengaruhi oleh budaya pesisir dan budaya Islam sehingga objek wisata cenderung berbasis religi. Objek wisata Colo berbasis pula pada potensi alam yang meliputi air terjun Montel dan Wisata Alam Rejanu. Kedua wisata tersebut menunjukkan keindahan alam Gunung Muria. Pemerintah khususnya perangkat desa Colo membentuk paguyuban Pokdarwis, masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UMKM) membentuk kelompok dagang, dan masyarakat lokal lainnya membentuk beberapa kelompok untuk ikut serta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kawasan objek wisata Colo. Syahriar (2015) menyebutkan dalam upaya pengembangan wisata diperlukan adanya kolaborasi pengelolaan secara langsung yang dapat berupa paket kegiatan yang terencana dan teragendakan sehingga dalam pengelolaan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan dari pihak yang terkait.

UMKM Kain Tenun Troso merupakan UMKM kreatif di Kabupaten Jepara yang berbasis budaya. UMKM Kain tenun ikat Troso ini masih menggunakan peralatan tradisional dan alat tenun bukan mesin (ATBM). Proses produksi dari awal hingga akhir masih mengandalkan pada keterampilan para pengrajin sehingga kuantitas kain tenun produksi Troso dinilai masih belum stabil sehingga masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. Hal tersebut berdampak pada pemasaran produk kain tenun Troso yang masih terbatas pada wilayah Bali dan Lombok terutama pada destinasi wisata. Motif kain tenun Troso juga tidak memiliki kekhasan dan motif cenderung mengikuti perkembangan jama. Selain adanya UMKM kreatif terdapat pula destinasi wisata di Kabupaten Jepara yaitu wisata Benteng Portugis dan wisata pantai Bandengan dan Pulau Panjang. Wisata Benteng Portugis merupakan destinasi wisata berbasis kearifan lokal khususnya pada bangunan-bangunan bersejarah sedangkan destinasi wisata pantai Bandengan dan Pulau Panjang merupakan destinasi wisata yang berbasis pada potensi alam.

UMKM Batik Bakaran yang berada di Kabupaten Pati merupakan salah satu UMKM kreatif yang berbasis budaya. Batik Bakaran ini dinilai masih belum mengalami perkembangan yang pesat seperti produk lokal dari Kota Solo dan Pekalongan padahal batik bakaran ini memiliki ciri khas tersendiri pada motif batiknya. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah maupun masyarakat lokal sehingga produk batik bakaran dapat dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan langsung terhadap ciri khas

Kabupaten Pati. Ciri khas motif batik Bakaran merupakan hasil perpaduan kebudayaan pedalaman dan pesisir masyarakat di Kabupaten Pati. Warna-warna pada batik bakaran khas Kabupaten Pati didominasi oleh warna hitam, putih dan coklat yang membentuk suatu corak dengan teknik memecah dalam membatik (*remekan*).

Wisata Budaya yang meliputi bangunan peninggalan bersejarah yakni Keraton Surakarta, Keraton Mangkunegaran, Museum Damar Hadi, Museum Radya Pustaka merupakan destinasi wisata yang berbasis budaya di Kota Solo. Wisata budaya yang berkembang pesat di Kota Solo merupakan hasil dari dukungan dan kepedulian Pemerintah Kota Solo beserta masyarakat lokal dalam pengelolaan kebudayaan lokal dan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Solo. Dukungan dan kepedulian Pemerintah ditunjukkan melalui pemberian wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung perkembangan pariwisata, pemberian bantuan dana kepada komunitas budaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain adanya dukungan dari Pemerintah setempat terdapat pula partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi tersebut tidak hanya berlandas pada keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup namun terdapat pula keinginan masyarakat lokal untuk mempertahankan seni dan warisan budaya Jawa. Kusuma (2015) menjelaskan pula bahwa masyarakat Kota Solo menilai wisata budaya Kota Solo sebagai suatu aspek penting bagi kehidupan masyarakat lokal dan adanya pengembangan wisata budaya dianggap mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Solo.

## **Kesimpulan**

UMKM Kreatif dan wisata yang berbasis kearifan lokal terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang dan ancaman yang diidentifikasi berdasarkan kondisi UMKM kreatif dan wisata. Potensi, kelemahan, ancaman yang terdapat pada UMKM kreatif dan wisata dirumuskan dalam bentuk matriks SWOT dapat dijadikan sebagai acuan dalam strategi pengembangan dan pembangunan UMKM kreatif dan wisata lokal dalam jangka panjang. Kelembagaan pada UMKM kreatif dan wisata juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya pengembangan UMKM kreatif dan wisata

UMKM Kreatif dan wisata yang berbasis budaya maupun religi di Provinsi Jawa Tengah yang telah dikembangkan antara lain adalah 1) Kawasan Objek Wisata Colo, Kabupaten Kudus; 2) UMKM Kain Tenun Troso, Wisata Benteng Portugis serta Wisata Pantai Bandengan dan Pulau Panjang, Kabupaten Jepara; 3) UMKM Batik Bakaran, Kabupaten Pati; dan 4) Wisata Budaya, Kabupaten Solo. UMKM kreatif dan kearifan lokal wisata yang

diangkat dari budaya dan religi dapat dijadikan sebagai potensi lokal yang dapat dikembangkan sekaligus membantu upaya proteksi terhadap budaya lokal. Pengembangan UMKM kreatif dan wisata berbasis budaya dan religi tersebut membutuhkan peran aktif Pemerintah setempat dan masyarakat lokal. Peran aktif Pemerintah dapat berupa pembiayaan operasional kegiatan kebudayaan, pemberian stimulan kepada komunitas pegiat seni dan budaya, pengadaan diskusi bersama antara pemerintah dengan pelaku UMKM kreatif dan wisata dan kemudahan dalam perijinan sedangkan peran aktif masyarakat dapat ditunjukkan melalui kegiatan kepedulian terhadap kebudayaan lokal.

### Daftar Pustaka

- Danandjojo, Y. N. (2014). Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Situs Megalit Gunung Padang sebagai Daya Tarik Pariwisata Budaya Berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK VINI*, 136-145.
- Fakih, M. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kencana, I. P., Arifin, & Susilo, N. H. (2010). Studi Potensi Lanskap Sejarah untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Bogor. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 7-13.
- Kongprasertamorn, K. (2007). Local Wisdom Environmental Protection and Community Development : The Clam Farmers in Tambin Bangkhunsai Phetchaburi Province, Thailand. *MANUSYA : Journal of Humanities*, 1-10.
- Kusuma, A. F., & Darwanto. (2015). Nilai-Nilai Modal Sosial yang Terkandung dalam Perkembangan Pariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*, Vol. 22, No.1, 65-84.
- Ommani, A. R. (2011). Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis for farming system business management : Case of wheat farmers of Shardevan District, Shoushtar Township, Iran. *African Journal of Business Managment* , 9449-9454.
- Osita, C. I., R., O. I., & Justina, N. (2014). Organization's stability and productivity : the role of SWOT analysis in acronym for strength, weakness, opportunities and threat. *IJIAR (International Journal Of Innovate and Applied Research)*, 23-32.
- Perdagangan, D. (2007). *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Dipetik September 27, 2016, dari <http://dgi-indonesia.com>
- Soemarwoto, O. (1993). *Pengembangan Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya* . Yogyakarta: Andi.
- Spillane , J. J. (1993). *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino.

- Spillane , J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Syahriar, G. H., & Darwanto. (2015). Modal Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata (Kasus Daerah Objek Wisata Colo Kabupaten Kudus). *Jurnal Eko-Regional, Vol. 10, No. 3*, 126-138.
- Syarif, M. (2013). Teori dan Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam. *Jurnal Media Akademika, Vol. 28, No. 3*, 333-362.
- Thoyibbi, M. (2003). *Sinergi Agama dan Budaya Lokal : Dialektika Muhammadiyah dan Seni Lokal*. Surakarta: MUP-UMS, PSB-PS UMS, Majelis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah.
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia-Social and Behavioral Sciences 216*, 97-108.
- Yustika, A. E. (2006). *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori dan Strategi* . Malang : Penerbit Bayu Media.
- Zohratun, N. (2013). *Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif* . Dipetik September 29, 2016, dari <http://journal.unisla.ac.id>

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN  
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014  
(STUDI DI KELURAHAN MUKA KUNING, KECAMATAN SI BEDUK,  
KOTA BATAM)**

**Linayati Lestari**

*Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Riau Kepulauan*

**ABSTRACT**

*Female voters is one of the electoral contestants were positively correlated with the quality of the policy according to the needs of women where women voters were significant in Muka Kuning village in the ratio of female voters and men are 32.254: 29.131 with the majority of women work as industrial workers. The purpose of this study was to determine the political behavior of women voters, and factors influencing the legislative elections in 2014 in the village of Sei Muka Kuning Batam drum method mixed method, with quota sampling technique to women voters at polling stations at Muka Kuning village.*

*Factors affecting the behavior of individuals and organizations are factors which the individual factors significantly more than the organizational factors. Ex political behavior of female voters. Mostly women at Muka Kuning as moderate voters, namely the ability to reflect on themselves well, internal control center, Personality High mach, investment organizations, alternative occupations are believed to exist, and the hope of success. While the factors that are included in the organization is a reallocation of resources, promotion opportunities, low confidence, role ambiguity, performance evaluation system is not clear, practices a zero-sum remuneration, democratic decision-making, high-performance pressure, and senior managers selfish. This study has reinforced the theory that Robin jugde individual factors and organiassi shaping the political behavior of women voters at Muka Kuning village conservative. This is affecting for 8889 women voters at Legislaif elections in 2014.*

***Keywords: Political Behavior, Women Voters, the legislative elections.***

**Pendahuluan**

Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah 2014 yang diselenggarakan pada 9 April

2014 untuk memilih 560 anggota dewan perwakilan rakyat (DPR RI), 132 anggota dewan perwakilan daerah (DPD), serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD provinsi maupun kabupaten/kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan perempuan merupakan salah satu kontestan pemilu dimana sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30%, pada pemilu 2014 secara terus-menerus dibutuhkan penguatan terhadap Undang-Undang tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan Umum (pemilu).

Keterwakilan berkorelasi positif dengan kualitas kebijakan yang betul-betul menjawab kebutuhan perempuan. Posisi strategis perempuan pemilih perlu terus menerus didorong agar dapat dimainkan secara optimal. Pemilu 2014 menjadi momentum untuk pemilih perempuan merefleksikan diri sekaligus berhati-hati menentukan pilihan di bilik suara nanti. Memilih secara kritis dengan menjaga martabat suaranya agar tidak mudah diberikan kepada mereka yang jelas-jelas tidak akan peduli dengan isu perempuan, apalagi mereka yang merendahkan dengan cara membeli. Idealnya perilaku politik pemilih perempuan lebih terbuka dan meningkat dengan dukungan yuridis tersebut. Perilaku politik pemilih perempuan baik untuk memilih ataupun terpilih merupakan kesadaran perempuan itu sendiri untuk mengakomodasi kepentingan khususnya yang mungkin saja tidak akan terwakili dari pelaku politik laki-laki. Maka dari itu, perilaku politik pemilih perempuan penting dan akan sangat menentukan kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam hal keikutsertaan dalam pemilihan, jumlah pemilih perempuan sangat potensial dalam mendulang suara pemilih. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kepri 1.323.627 pemilih, jumlah pemilih terbanyak berada di Kota Batam dengan rasio pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 680.012 : 643.615<sup>1</sup>. Berdasarkan data tersebut, pemilih perempuan di Kepulauan Riau yang berjumlah 643.615, lebih dari setengahnya yaitu 364.581 yang berada di Kota Batam.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Data KPU tahun 2014



Berdasarkan dinamika politik lokal Kota Batam dalam Pilihan legislatif 2014 dianalisa oleh banyak pihak sebagai pemilihan terburuk dengan banyaknya kecurangan pemilu yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)<sup>2</sup>.

Bahkan lebih parahnyalagi ada sejumlah TPS yang melakukan kecurangan secara massif dengan melibatkan panitia pemilih, ataupun dugaan *money politic* oleh sejumlah caleg<sup>3</sup>. Bentuk lain juga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait mobilisasi massa, undangan palsu atau gunakan undangan orang lain, dan percobaan mencoblos lebih dari satu kali<sup>4</sup>. Dengan adanya pemilihan legislatif 2014, pemilih perempuan bukanlah sebagai objek politik untuk dieksploitasi demi kemenangan kandidat tertentu. Akan tetapi, pilihan politik pemilih perempuan di kelurahan Muka Kuning sebagai warga negara Indonesia tidak bernilai murah untuk melahirkan pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah dilakukan observasi awal di lokasi penelitian, penulis menemukan permasalahan dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum legislatif Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk yaitu:

1. Pemilih perempuan menjadi objek eksploitasi politik dengan cara mobilisasi ke TPS di luar Kel. Muka Kuning.
2. Pemilih perempuan yang juga sebagai pekerja industri di Kawasan Industri Muka Kuning bersikap acuh dan bersedia bertransaksi politik dengan menukarkan hak suaranya dengan uang (*money politic*).
3. Pemilih perempuan tidak mengetahui calon anggota legislatif baik untuk tingkat kota, provinsi ataupun nasional.
4. Pemilih perempuan tidak bisa memastikan terdaftar dalam DPT karena terlalu disibukkan dengan rutinitas ganda sebagai pekerja, ibu dan istri yang sangat menyita waktu untuk sekedar tahu rangkaian dari aktivitas politik yang sedang berlangsung.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan <http://www.kepri.info/lsm-nilai-pileg-di-batam-gagal/diunduh> 15 Mei 2015

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Berdasarkan <http://mediacenter.batamkota.go.id/panwaslu-tangani-tujuh-laporan-kecurangan-pemilu/> diunduh 15 Mei 2015

5. Pemilih perempuan tidak mengetahui tahapan penyelenggaraan Pileg 2014, pada temuan lain pemilih perempuan mengaku tertarik dengan profil salah satu calon legislatif (caleg) dari brosur akan tetapi disisi lain mereka tidak mengetahui program kerja dari masing-masing kandidat.

- **Tidak ada Batasan Penelitian**
- **Rumusan Masalah**
- **Tujuan Penelitian**
- **Dan Tinjauan Pustaka**

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode *mixed method* (kuantitatif dan kualitatif). Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif perilaku politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diukur dalam butir-butir pertanyaan kuesioner dan wawancara.

Metode penelitian *mixed method* adalah kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif memadukan data kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik<sup>5</sup>. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

---

<sup>5</sup> Tashakkor dan Teddlie, 1998 : *penggabungan kualitatif dan kuantitatif*, Kiessling dan Harvey, 2005; Morse, 2009

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>6</sup>

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk dengan melihat perilaku politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian adalah jumlah yang besar dari angka pemilih perempuan berdasarkan temuan pada observasi awal seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang Penelitian ini didukung dengan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara melalui pertanyaan terstruktur terhadap kepada pemilih perempuan yang terpilih secara *quota sampling*.

## 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan pedoman wawancara dengan jawaban pertanyaan dari pemilih perempuan pada masing-masing TPS. Tiap TPS akan dipilih secara acak informan yang akan memberikan jawaban penelitian dengan membatasi jumlahnya per TPS (*quota sampling*), Selanjutnya data diperoleh dari hasil wawancara terhadap 1 orang dari petugas PPS Kelurahan muka kuning dan 4 orang dari responden Pemilih perempuan yang terpilih secara incidental.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk peraturan perundangan, surat keputusan, laporan, catatan dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder tersebut berupa data yang sudah ada dari pihak KPU tentang pemilih perempuan dan anggota legislatif

---

<sup>6</sup>Prof. Dr. Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2010, Hal. 01

ataupun data lainnya yang berbentuk laporan, bagan, tabel ataupun data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari informan maka dilakukan dengan *quota sampling*. Pemilihan teknik *quota sampling* karena jumlah responden yang besar yang tersebar dalam banyak TPS, sejumlah 34 TPS. Untuk mendapatkan responden dipilih dari populasi pada seluruh TPS yang ada di Kelurahan Muka Kuning diambil per TPS sebanyak 2 orang. Data informan didapatkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah proses pengamatan dan ingatan terhadap Perilaku Politik Pemilih perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
2. Kuesioner adalah butir pertanyaan yang relevan sebagai indikator penelitian tentang perilaku politik perempuan pemilih.
3. Studi Kepustakaan, mengumpulkan data sebagai referensi berdasarkan *text book* dan jurnal ilmiah

Dalam pengumpulan data juga dilakukan keabsahan data dengan triangulasi sumber data terhadap petugas PPS Kel. Muka Kuning dan 4 (empat) orang responden yang terpilih secara *incidental* berupa wawancara mendalam atas jawaban kuesioner. Mereka adalah informan penelitian dari TPS 2, 3, 34, dan TPS 28. Wawancara diperlukan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, populasi dalam perilaku politik

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Op.Cit.*hlm. 99

pemilih perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam adalah perempuan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan legislatif 2014 di seluruh TPS Muka Kuning dengan jumlah 8889 orang yang tersebar dalam 34 TPS. Dari populasi tersebut akan diambil sampel untuk mewakili populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik penarikan sampel quota sampling (menetapkan batas sampel sesuai kategori), sampel akan dipilih dengan metode acak sederhana dari populasi. Menurut Roscoe yang memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel: ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian<sup>8</sup>. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 68 responden dengan memperhatikan *quota sampling* per TPS, dimana pemilih perempuan yang dipilih sebagai responden diambil 2 orang per TPS, adapun nama responden terlampir.

### Hasil Penelitian

Perilaku politik moderat merupakan wujud perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning yang bersifat selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah, dan mau mempertimbangkan pandangan orang lain. Hal ini telah menguatkan gagasan teori Robin Judge dimana Sejumlah faktor yang mendorong perilaku politik adalah sebagian merupakan karakteristik individu, yang berasal dari sifat- sifat unik yang direkrut oleh organisasi; sebagian lainnya adalah hasil dari kultur atau lingkungan internal organisasi.

Pada tataran individu, para peneliti telah mengidentifikasi sifat- sifat kepribadian tertentu, kebutuhan dan beberapa faktor lain yang dapat dikaitkan dengan perilaku politik seseorang. Dalam hal sifat, kita menemukan bahwa para karyawan yang mampu merefleksi diri secara baik (*high self monitor*), memiliki pusat kendali

---

<sup>8</sup> Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006)  
<http://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel/> diunduh 21 Agustus 2015.

(*locus of control*) internal, dan memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan punya kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku politik.

Selain itu, investasi seseorang dalam organisasi, alternatif – alternatif yang diyakininya ada, dan harapan akan kesuksesan turut memengaruhi sejauh mana ia akan memanfaatkan sarana tindakan politik yang tidak sah. Semakin besar investasi seseorang dalam organisasi karena harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan, semakin besar pula kerugian yang harus ditanggungnya jika terpaksa harus keluar dari sana dan semakin kecil kemungkinan bahwa ia akan menggunakan sarana politik yang tidak sah.

Seseorang memiliki harapan akan kesuksesan yang rendah dalam menggunakan sarana yang tidak sah, ia tidak mungkin berbuat demikian. Harapan akan kesuksesan yang tinggi dalam penggunaan sarana yang tidak sah kemungkinan besar merupakan wilayah orang-orang yang berpengalaman dan berkuasa yang terampil berpolitik maupun karyawan tidak berpengalaman dan naif yang salah menilai peluang mereka.

Dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Perilaku politik, yaitu faktor- faktor individu dan faktor- faktor organisasi. Hal- hal yang termasuk dalam faktor- faktor individu adalah kemampuan merefleksi diri dengan baik, Pusat kendali internal, Kepribadian *High mach* (“lincah”), Investasi organisasi, alternatif pekerjaanyang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor-faktor organisasi adalah realokasi sumber daya, peluang promosi, tingkat kepercayaan rendah, ambiguitas peran, Sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktik-praktik imbalan *zero-sum*, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan kinerja tinggi, dan para manajer senior yang egois.

### **Pembahasan**

Mayoritas pemilih perempuan di Kelurahan Muka Kuning paling banyak berada pada rentang usia 18-25 tahun. Sebagai pemilih yang berada pada kategori pemilih muda, maka tentu sangat menarik dengan melihat potensi masyarakat

Kelurahan Muka Kuning sebagai pekerja pada sejumlah Industri. Tingginya jumlah pemilih sebagai pekerja menandakan bahwa mobilitas penduduk pada Kelurahan Muka Kuning karena jumlah mereka menempati posisi paling banyak pemilih, kemudian baru diikuti dengan pemilih paruh baya dengan rentang usia 36-45 sebanyak 24 %.

Pemilih perempuan yang mayoritas pekerja industri. Sementara itu, berdasarkan data statistik demografi Kel. Muka Kuning adalah sebagai pekerja perusahaan, pegawai, pekerja industri, dan berwiraswasta dan pelajar. Sebagai kelurahan strategis dalam pusat Kota Batam, maka Kel. Muka Kuning adalah kelurahan yang sangat potensial baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya dukung lingkungan. responden memiliki suku bangsa sangat beragam. Bahkan terdapat 3 suku bangsa, yaitu Jawa (23 %), Melayu (19 %) dan Minangkabau (18 %) dengan sebaran yang hampir sama. Dengan mayoritasnya adalah Suku Bangsa Batak. Walaupun terdapat juga suku bangsa lainnya dengan jumlah yang relatif sedikit, misalnya flores (5 %). Secara keseluruhan, dari data-data demografi yang telah ditampilkan dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini telah cukup mewakili heterogenitas populasi, yaitu pemilih perempuan pada Pemilihan Legislatif 2014. Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah responden yang mewakili pemilih perempuan mutlak 99 %.

Perilaku politik perempuan Kel. Muka Kuning berkaitan dengan kemampuan merefleksi diri dengan baik. Sedangkan 25 orang responden menyatakan tidak ada kaitan dalam merefleksi diri dalam berperilaku dalam pemilihan legislatif 2014. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa kemampuan merefleksi diri dengan baiklah yang menyebabkan mereka berperilaku dalam pemilihan dalam ajang pemilu legislatif. Kegiatan politik cukup menyita perhatian mereka dengan adanya himbauan HRD (personalia) mereka yang memberikan toleransi memilih ketika hari H (pencoblosan). Kesempatan tersebut mereka gunakan sebagai kegiatan alternatif untuk menghindari rutinitas pekerjaan mereka. Pemilih perempuan yang banyak berprofesi sebagai operator menyatakan bahwa mereka

terkadang cukup jemu berada pada lingkungan pekerjaan, ajang pemilihan pada hari H pencoblosan dianggap sebagai momen yang tepat sebagai warga Negara yang baik untuk memberikan hak pilihnya.

Mereka sangat menghargai ajang pemilihan lima tahunan tersebut sebagai kegiatan perhelatan bangsa yang mengharuskan mereka mengambil bahagian didalamnya. Bahkan euphoria tersebut mereka jadikan alasan untuk melakukan pencoblosan pada TPS lain dimana mereka tidak memiliki surat panggilan pencoblosan. Pemilih perempuan berperilaku politik dengan memilih calon anggota legislatif yang dianggap dekat baik dari wajah calonnya yang sering mereka lihat pada iklan ataupun media sosial yang mereka miliki. Bahkan dijumpai pekerja yang dipengaruhi oleh temannya.

Dapat dikatakan bahwa pemilih perempuan Kel. Muka Kuning mayoritas tidak memiliki pusat kendali internal dalam memberikan hak pilihnya terhadap calon anggota legislatif 2014. Dari 29 orang responden pemilih perempuan Kel. Muka Kuning, kesungguhan mereka untuk mendapatkan wakil rakyat yang bisa benar-benar memahami kebutuhan rakyat dan peduli terhadap tuntutan masyarakat adalah harapan mereka untuk memilih.

Mereka menginginkan anggota legislatif yang bukan titipan dari dinasti politik karena pola kekerabatan yang cukup lama berada pada wilayah kekuasaan, tidak pula mereka mengharapkan anggota dewan yang terpilih nantinya adalah sekelompok preman yang hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskan anggaran untuk kepentingan segelintir pihak dengan mengabaikan kebijakan terhadap masyarakat luas dalam hal pembangunan yang akan mempertinggi kualitas kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan ataupun kebutuhan rohani. Sementara itu, 28 orang responden menyatakan bahwa bahwa bukanlah kepribadian yang lincah yang mempengaruhi perilaku politiknya. Hal yang ingin diungkap oleh mereka adalah karena mereka ingin merasakan pengalaman dalam pencoblosan suara. Keingintahuan mereka tentang proses pencoblosan adalah rangsangan dari stimulus luar untuk berperilaku dalam pemilihan anggota legislatif 2014.



Kepribadian yang lincah bukan sebagai penggerak utam mereka untuk berperilaku akan tetapi stimulus dari luar sebagai rangsangan mereka dalam memilih.

Pemilih perempuan Kel. Muka Kuning dalam perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning terkait dengan variabel faktor individu dan faktor organisasi terlihat bahwa perilaku politik masyarakat akan dipengaruhi oleh beragamnya nilai-nilai yang mereka miliki dimana kondisi perempuan relevan dengan hubungan simbolik berupa ikatan emosional, esensinya perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik

Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah menggali real perilaku politik masyarakat sesuai dengan hati nuraninya. Hal yang mungkin bisa dideteksi adalah jawaban yang diberikan masyarakat secara langsung melalui bahasa verbal yang mereka informasikan. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberikan pendidikan politik secara berjenjang mulai dari tingkat yang paling sederhana, keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, organisasi, media massa ataupun partai politik itu sendiri. Karena akses kepada seluruh masyarakat serta wakil dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum pertemuan publik ataupun langsung dalam bentuk pemberian hak politik sangat penting dan langsung bagi lahirnya kepemimpinan yang benar-benar mencerminkan akomodasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya representasinya kepentingan masyarakat dalam penyusunan wakil-wakil yang akan mewakili kepentingannya akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, setiap perilaku politik akan berdampak pada pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan,

maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, wakil masyarakat sebagai anggota legislatif harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada pemilihnya.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Perilaku politik, yaitu faktor- faktor individu dan faktor-faktor organisasi. Hal-hal yang termasuk dalam faktor- faktor individu adalah kemampuan merefleksi diri dengan baik, Pusat kendali internal, Kepribadian *High mach* (“lincah”), Investasi organisasi, alternatif pekerjaanyang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor- faktor organisasi adalah realokasi sumber daya, peluang promosi, tingkat kepercayaan rendah, ambiguitas peran, Sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktik- praktik imbalan *zero-sum*, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan kinerja tinggi, dan para manajer senior yang egois.

Berdasarkan hasil pemaparan secara keseluruhan, pemilih perempuan Kel. Muka Kuning lebih dipengaruhi oleh faktor individu dalam berperilaku politik menyikapi pemilihan anggota legislatif 2014 dibandingkan dengan faktor organisasi. Hal ini tentu saja memperlihatkan interaksi yang terjadi didalam kelompok-kelompok sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan sebagainya akan menjadi susunan bangunan pengetahuan yang akan mempengaruhi preferensi politik dan perilaku pemilih seseorang hingga kemudian akan mempengaruhi bentuk-bentuk pilihan politiknya. hasil kesimpulan mengenai Perilaku Politik Pemilih perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kel. Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

### **Saran**

adapun hal yang bisa disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukan penelitian lain untuk mengetahui Analisis Pengaruh Faktor Individu dan Organisasi terhadap perilaku politik, hal ini diperlukan dalam mengukur derajat dan signifikansi maupun korelasi kedua faktor tersebut dalam melahirkan perilaku politik pemilih perempuan
2. Diperlukan stimulasi untuk memberikan variasi perilaku politik tidak hanya berupa moderat, melainkan juga keberagaman perilaku lainnya berupa konservatif, ataupun status quo sehingga terjadi perilaku politik yang cukup kompleks dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Diperlukan etika berperilaku secara politis sehingga dengan perilaku politik pemilih perempuan yang moderat bukanlah menjadi alasan untuk memobilisasi pemilih berdasarkan kepentingan partai tertentu

Tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan power (kekuasaan) dalam hal pengendalian sumber daya organisasi demi mencapai hasil yang diharapkan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam organisasi, semakin tinggi tingkat perilaku politik dan semakin mungkin perilaku politik itu akan tidak sah. Karenanya, tingkat kepercayaan yang tinggi secara umum akan menekan tingkat perilaku politik dan secara khusus akan menghambat tindakan politik

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004*, Pustaka Eureka: Surabaya
- Canggra, Hafied, 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi. Cet. Ke-3*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Krisno, Hadi, 2006, *Perilaku Politik dan Pemilu 2004*, UMM Press: Malang
- Prof. Dr. Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Saifudin, Azwar, 2005, *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya Edisi Ke-2* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tashakkor dan Teddlie, 1998 : *penggabungan kualitatif dan kuantitatif*, Kiessling dan Harvey, 2005; Morse, 2009
- Data KPU tahun 2014  
<http://www.kepri.info>  
<http://mediacenter.batamkota.go.id>

## SERVICE QUALITY OF BENGKULU CITY FIRE DEPARTMENT

**Bobby Mandala Putra**  
*Universitas Putera Batam*

### Abstract

This study was aimed to investigate the service quality of Bengkulu City Fire Department in the field of fire fighting using five dimensions quality of public services, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy as a research instrument. This study used a quantitative approach with a descriptive research which focuses on survey method. Primary data collection was done by giving questionnaires that have been tested for validity and reliability to the respondents, while secondary data collection was done by conducting a review of the literature and relevant research, fire incident reports and documentation activities related to research needs. Data analysis was performed using quantitative data analysis techniques namely descriptive statistics with SPSS for Windows version 20. The finding of the research showed that the quality of service Bengkulu City Fire Department in the field of fire fighting if it measured in a unit with five dimensions of quality of public services, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy then the service quality of Bengkulu City Fire Department in the field of fire fighting had enough quality with a mean was 3,39, median was 3.54, the modus was 3, standard deviation was 0.614, the variance was 0.377, the minimum was 2, and the maximum was 5, however if it measured separately between the dimensions of the other dimensions, the quality of service of Bengkulu City Fire Department in the field of fire fighting was varied enough. It was proven by the average of respondents' answers on the dimensions of tangibles, and assurance stating that the quality of Bengkulu city fire fighting services had good quality, while the average of respondents on the other three dimensions, namely reliability, responsiveness, and empathy had enough quality.

Keywords: *Quality of Services, Service Quality, Public Services, Fire Services*

### PENDAHULUAN

“Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Adapun pelayanan kebutuhan dasar ini meliputi: pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan pelayanan bahan kebutuhan pokok, sedangkan pelayanan umum terbagi dalam tiga kelompok, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa (Hardiyansyah, 2011)

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih belum cukup berkualitas. Hal ini diindikasikan oleh sering diabaikannya standar pelayanan, maklumat pelayanan dan sistem informasi pelayanan publik oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dan banyaknya keluhan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang disampaikan melalui media massa atau dilaporkannya pihak penyelenggara/pelaksana pelayanan publik kepada Ombudsman Republik Indonesia. Keluhan/laporan yang dimaksud seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian layanan, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, petugas yang tidak profesional dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan bentuk kebijakan publik yang secara substantif bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan publik seperti yang telah disebutkan di atas, tapi sayangnya sampai saat ini kualitas pelayanan publik di Indonesia terutama di daerah masih belum cukup berkualitas. Salah satu pelayanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah pelayanan pemadam kebakaran.

“Tiada hari tanpa kebakaran” merupakan sebuah postulat yang tidak ada lagi yang meragukannya. Setiap hari kita bisa melihat bencana kebakaran di Indonesia melalui media massa baik lokal maupun nasional. Mengingat bencana kebakaran ini merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi sebelumnya maka dibutuhkan pelayanan pemadaman kebakaran yang

berkualitas supaya kerugian materil dan non materil dapat diminimalisir. Namun sayangnya, tingginya frekuensi kejadian kebakaran ini tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran yang diberikan kepada masyarakat selaku pengguna jasa layanan. “PBK datang terlambat”, “PBK tidak professional”, “PBK tidak cepat tanggap” merupakan beberapa ungkapan kekecewaan masyarakat akan pelayanan institusi pemadam kebakaran.

Ungkapan kekecewaan terhadap pelayanan pemadam kebakaran ternyata juga terjadi di Kota Bengkulu. Pada tanggal 16 Juni 2014 pada pukul 07.40 WIB, kebakaran terjadi di Simpang Kandis Kecamatan Selebar dan berjarak kurang dari 100 meter dari pos siaga pemadam kebakaran. Seorang warga bernama Harun mengatakan bahwa pada saat kebakaran terjadi para petugas pemadam kebakaran sedang tidur dan ketika dibangunkan untuk memadamkan kebakaran, mobil pemadam kebakaran tidak dapat difungsikan atau dalam keadaan rusak. Akibat insiden tersebut 13 ruko ludes terbakar dan pos siaga pemadam kebakaran tersebut nyaris dibakar warga (Renins, 2014). Pada tanggal 25 Juni 2014, kebakaran kembali terjadi di Jl. Hibrida Kelurahan Sido Mulyo Kota Bengkulu. Saksi mata sekaligus anak pemilik rumah yang terbakar juga menyesalkan pelayanan pemadam kebakaran Kota Bengkulu yang dinilai lamban dalam merespon laporan kebakaran. Menurut saksi mata petugas PBK beserta armada baru datang ke lokasi kejadian setelah 1 jam kejadian kebakaran (Rahman, 2014)

Meskipun ada minat yang sangat tinggi terhadap persolan pelayanan publik namun anehnya, sangat sedikit ilmuan sosial yang meneliti kualitas pelayanan pemadam kebakaran. Para ilmuan yang telah meneliti persoalan pelayanan publik lebih banyak meneliti tentang pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar, dan pelayanan administratif.

Langkanya informasi tentang kualitas pelayanan institusi pemadam kebakaran ini tentu saja sangat disayangkan mengingat bencana kebakaran selalu selalu terjadi setiap hari di Indonesia. Informasi mengenai kualitas pelayanan institusi pemadam kebakaran akan dibutuhkan oleh pemerintah khususnya institusi pemadam kebakaran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kajian akademik yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran di Indonesia.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mendeskripsikan kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran. Kualitas pelayanan pemadaman kebakaran ini diukur dengan menggunakan teori

kualitas pelayanan publik Zeithaml dkk (Zeithaml, 2005). Teori kualitas pelayanan publik ini terdiri dari lima dimensi yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (reliabilitas), *responsiveness* (daya tangap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Widodo, 2001). Pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Wasistiono, 2001).

Penilaian terhadap kualitas pelayanan pemadaman kebakaran sangat penting, sebab dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemadam kebakaran memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat korban kebakaran selaku pengguna jasa. Penilaian kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi/ petugas seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas (Dwiyanto, 2002). Penilaian kualitas dari sisi pengguna jasa sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

**Rumusan Masalah**  
**Tujuan Penelitian**  
**Tinjauan Pustaka**  
**Metode Penelitian**

**Jenis Penelitian**

Berdasarkan pengelompokan penelitian menurut metode, penelitian ini adalah penelitian survey. Berdasarkan pengelompokan penelitian menurut tingkat explanasi, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan pengelompokan penelitian menurut jenis dan analisis data, maka penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2013).

**Definisi Konsep & Operasional**

Pelayanan pemadaman kebakaran adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas teknis bidang pemadaman kebakaran yang dirasakan masyarakat ketika menerima pelayanan



pemadaman kebakaran yang diukur dari aspek *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*.

### **Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran**

- *Tangibles* (bukti fisik), meliputi ketersediaan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi yang dimiliki oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Dimensi ini terdiri atas beberapa indikator, antara lain:
- *Reliability* (reliabilitas), yakni kemampuan tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran dengan cepat (*on time*), tepat (*accurately*), terpercaya (*trusted*) dan memuaskan (*satisfy*). Dimensi ini terdiri atas beberapa indikator, antara lain:
- *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu komitmen tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran berdasarkan hasil analisa situasi dan kondisi di lapangan. Dimensi ini terdiri atas beberapa indikator, antara lain:
- *Assurance* (jaminan), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan kejujuran yang dimiliki anggota/tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran. Dimensi ini terdiri atas beberapa indikator, antara lain:
- *Emphaty* (empati), meliputi sikap tim/anggota pemadam kebakaran Kota Bengkulu yang memahami kebutuhan dan kesulitan korban kebakaran ketika berinteraksi dengan korban kebakaran. Dimensi ini terdiri atas beberapa indikator, antara lain:

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kebakaran di Kota Bengkulu pada tahun 2014 yaitu sebanyak 64 kejadian kebakaran dan respondennya adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu yang terdiri dari korban atau saksi mata bencana kebakaran) yang merasakan atau menyaksikan secara langsung pelayanan pemadaman kebakaran oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu pada tahun 2014.

Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan teknik *probability sampling*. Teknik *probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan jumlah atau ukuran sampelnya ditentukan berdasarkan rumus *Isaac* dan *Michael*. Jadi, berdasarkan rumus di atas, untuk tingkat kesalahan 5% maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 kejadian kebakaran dan 55 orang.

### **Sumber Data Penelitian**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari masyarakat pengguna jasa pelayanan pemadam kebakaran Kota Bengkulu. Dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat (korban atau saksi mata bencana kebakaran) yang merasakan atau menyaksikan langsung pelayanan pemadaman kebakaran oleh Kantor Pemadam di Kota Bengkulu pada tahun 2014. Data sekunder merupakan data pendukung penelitian. Data ini diperoleh dengan cara melakukan review terhadap literatur-literatur dan penelitian-penelitian yang relevan, laporan kejadian kebakaran dan laporan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan kebutuhan penelitian, dan melakukan dokumentasi kegiatan penelitian.

### **Validitas dan Reliabilitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan *Software SPSS for Windows versi 20*, maka kuisioner yang digunakan dalam penelitian sebanyak 17 item pernyataan yang terdiri dari 4 pernyataan untuk dimensi *tangibles*, 3 pernyataan untuk dimensi *reliability*, 3 pernyataan untuk dimensi *responsiveness*, 4 pernyataan untuk dimensi *assurance*, dan 3 pernyataan untuk dimensi *emphaty* semuanya valid. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing item mempunyai nilai signifikansi  $\leq$  dari 0,005.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas terhadap 17 item pernyataan dalam kuisioner penelitian ini adalah 0,974. Artinya kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan mempunyai derajat reliabilitas yang baik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan atau memberikan kuisioner kepada responden (sampel penelitian), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap literatur-literatur dan penelitian-penelitian yang relevan, laporan kejadian kebakaran dan laporan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan kebutuhan penelitian, dan melakukan dokumentasi kegiatan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software*

*SPSS for Windows versi 20*. Analisis statistik yang dimaksud antara lain penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang (*crosstab*), penyajian data dalam bentuk visual yaitu histogram, penghitungan ukuran tendensi sentral (mean, median, modus), penghitungan ukuran penyebaran (standar deviasi, varian, nilai minimum dan maximum).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

### Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	45	81,8
Perempuan	10	18,2
<b>Usia</b>		
20-40	33	60
41-61	21	38,19
62-82	1	1,81
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
≤SMA/Sederajat	24	43,63
Diploma	6	10,92
≥Sarjana/Sederajat	25	45,45
<b>Jenis Pekerjaan</b>		
PNS/TNI/POLRI	22	40
Swasta	30	54,55
Lain-lain	3	5,45
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Setelah peneliti melakukan olah data secara manual dengan menggunakan bantuan tabel data distribusi jawaban responden yang diolah dari hasil tabulasi data dari kuisioner, selanjutnya peneliti menggunakan bantuan *Software SPSS for Windows* versi 20, untuk mengetahui kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran. Hasilnya adalah sebagai berikut:

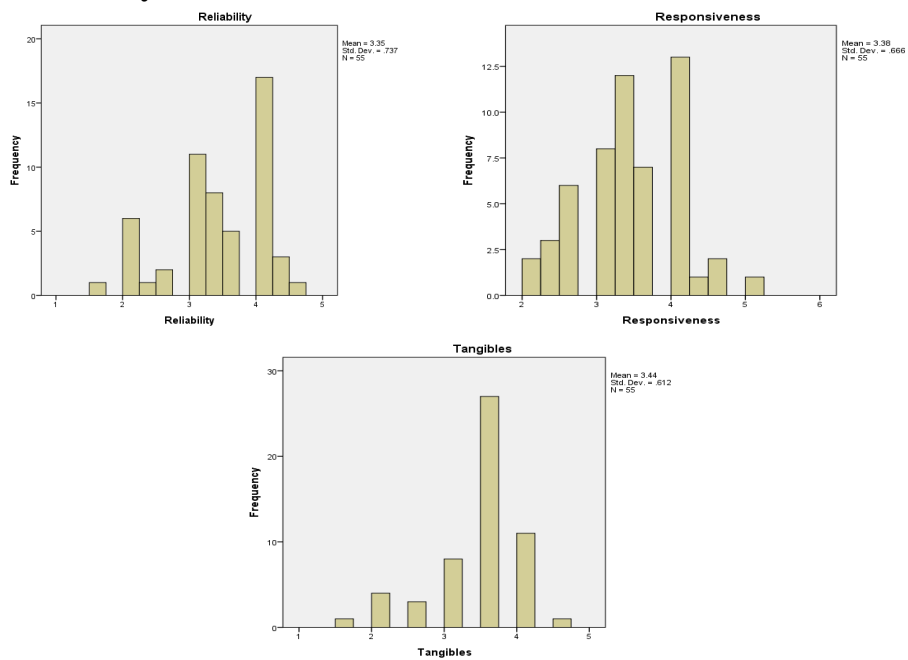
### Statistik Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran berdasarkan 5 Dimensi Serqual

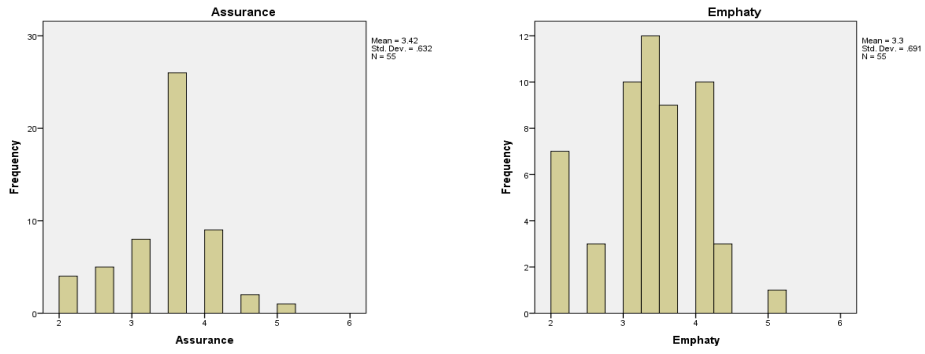
	<i>Tangibles</i>	<i>Reliability</i>	<i>Responsiveness</i>	<i>Assurance</i>	<i>Emphaty</i>
<i>N</i> Valid	55	55	55	55	55
<i>Missing</i>	0	0	0	0	0

<b>Mean</b>	3.46	3.35	3.38	3.42	3.30
<b>Median</b>	3.70	3.30	3.30	3.50	3.30
<b>Mode</b>	4	4	4	4	3
<b>Std. Deviation</b>	.612	.737	.666	.632	.691
<b>Variance</b>	.375	.544	.444	.400	.478
<b>Minimum</b>	2	2	2	2	2
<b>Maximun</b>	5	5	5	5	5

Sumber: Hasil olah data penelitian 2015

### Histogram Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran berdasarkan 5 Dimensi Serqual





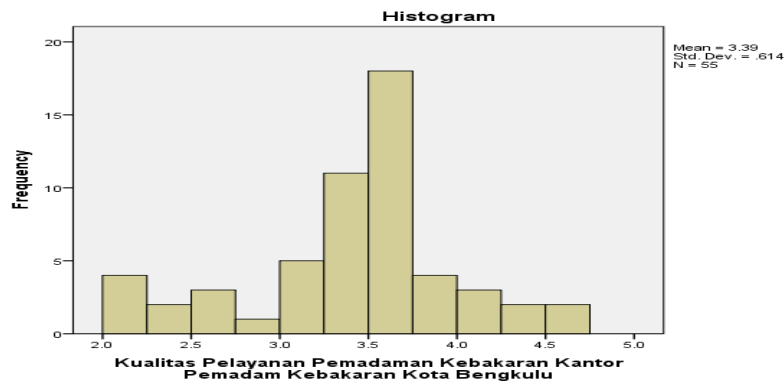
Sumber : Hasil olah data penelitian 2015

**Statistik Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Rata-rata**

<b>Valid</b>	55
<b>N</b>	
<b>Missing</b>	0
<b>Mean</b>	3.39
<b>Median</b>	3.54
<b>Mode</b>	3 <sup>a</sup>
<b>Std. Deviation</b>	.614
<b>Variance</b>	.377
<b>Minimum</b>	2
<b>Maximun</b>	5

Sumber: Hasil olah data penelitian 2015

**Histogram Kualitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Rata-rata**



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari dimensi *tangibles* dapat diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,44, *median* (nilai tengah) adalah 3,70, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 4, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,612, *variance* adalah 0,375, nilai minimum adalah 2, dan nilai maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 3,41-4,24 adalah berkualitas, maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *tangibles* adalah berkualitas.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari dimensi *reliability* diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,35, *median* (nilai tengah) adalah 3,30, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 4, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,737, *variance* adalah 0,544, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 2,61-3,40 adalah cukup berkualitas, maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *reliability* adalah cukup berkualitas.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari dimensi *responsiveness* diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,38, *median* (nilai tengah) adalah 3,30, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 4, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,666, *variance* adalah 0,444, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 2,61-3,40 adalah cukup berkualitas, maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *responsiveness* adalah cukup berkualitas.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari dimensi *assurance* diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,42, *median* (nilai tengah) adalah 3,50, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 4, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,632, *variance* adalah 0,400, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 3,41-4,24 adalah berkualitas, maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *assurance* adalah berkualitas.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari dimensi *emphaty* diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,30, *median* (nilai tengah) adalah 3,30, modus (nilai yang paling sering keluar) adalah 3, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,691, *variance* adalah 0,478, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 2,61-3,40 adalah cukup berkualitas, maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *emphaty* adalah cukup berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil penelitian dari seluruh dimensi kualitas pelayanan publik yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty* diketahui bahwa *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,39, *median* (nilai tengah) adalah 3,54, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 3, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,614, *variance* adalah 0,377, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 2,61-3,40 adalah cukup berkualitas. Jadi, kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari seluruh dimensi kualitas pelayanan publik yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty* adalah cukup berkualitas.

Hasil penelitian ini menolak hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemadaman kebakaran pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Hasil survey tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran berkualitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga menolak pemberitaan media massa lokal yang membentuk opini publik bahwa pelayanan pemadaman kebakaran di Kota Bengkulu sangat tidak berkualitas. Penolakan atas hasil survey IKM tersebut dan penolakan atas pemberitaan media lokal pada tanggal 16, 17 dan 25 Juni 2014 berdasarkan hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa dari lima dimensi kualitas pelayanan yang dijadikan sebagai instrumen penelitian, dua dimensi yaitu *tangibles* dan *assurance* membuktikan bahwa pelayanan pemadaman kebakaran berkualitas, sedangkan tiga dimensi lainnya yaitu *reliability*, *responsiveness*, dan *emphaty* adalah cukup berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sampai saat ini masyarakat korban kebakaran merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu sudah cukup berkualitas, namun belum mampu memuaskan atau menyentuh hati

masyarakat sepenuhnya. Masyarakat membutuhkan pelayanan pemadaman kebakaran yang cepat tanggap yaitu tidak lebih dari 15 menit sudah tiba di lokasi setelah menerima laporan kebakaran dan membutuhkan perhatian personal dari tim pemadam kebakaran yang sedang atau telah melakukan tugas pemadaman kebakaran. Dengan demikian pihak penyelenggara pelayanan pemadaman kebakaran sangat perlu melakukan optimalisasi manajemen pelayanan melalui pembaharuan standar operasional prosedur yang dapat menjamin bahwa tim pemadam kebakaran mampu tiba di lokasi kebakaran tidak lebih dari 15 menit setelah menerima informasi kebakaran, melayani masyarakat korban kebakaran tidak hanya sebatas fisik namun juga mampu menyentuh psikologisnya, meningkatkan kompetensi aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadaman, melakukan evaluasi kinerja secara kontinyu agar dapat diketahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat melalui pusat pengaduan, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan menjadi pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang memuaskan masyarakat.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran jika diukur secara satu kesatuan dengan lima dimensi kualitas pelayanan publik yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty* maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran adalah cukup berkualitas yaitu dengan *mean* (nilai rata-rata) adalah 3,39, *median* (nilai tengah) adalah 3,54, *modus* (nilai yang paling sering keluar) adalah 3<sup>a</sup>, standar deviasi (nilai simpangan baku) adalah 0,614, *variance* adalah 0,377, minimum adalah 2, dan maksimum adalah 5. Dengan demikian, berdasarkan *range* nilai standar penilaian kualitas pelayanan pemadaman kebakaran dengan nilai rata-rata 2,61-3,40 adalah cukup berkualitas, namun jika diukur secara terpisah antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya maka kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran adalah cukup bervariasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari dimensi *tangibles* diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi



*tangibles* adalah berkualitas. Dimensi *tangibles* (bukti fisik) yang dimaksud meliputi ketersediaan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi yang dimiliki oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian dari dimensi *reliability* diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *reliability* adalah cukup berkualitas. Dimensi *reliability* (reliabilitas) yang dimaksud adalah kemampuan tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran dengan cepat (*on time*), tepat (*accurately*), terpercaya (*trusted*) dan memuaskan (*satisfy*).

Berdasarkan hasil penelitian dari dimensi *responsiveness* diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *responsiveness* adalah cukup berkualitas. Dimensi *responsiveness* (daya tanggap) yang dimaksud adalah komitmen tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran berdasarkan hasil analisa situasi dan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari dimensi *assurance* diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *assurance* adalah berkualitas. Dimensi *assurance* (jaminan) yang dimaksud mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan kejujuran yang dimiliki anggota/tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu ketika melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian dari dimensi *emphaty* diketahui bahwa kualitas pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu di bidang pemadaman kebakaran dari dimensi *emphaty* adalah cukup berkualitas. Dimensi *emphaty* (empati) yang dimaksud meliputi sikap tim/anggota pemadam kebakaran Kota Bengkulu yang memahami kebutuhan dan kesulitan korban kebakaran ketika berinteraksi dengan korban kebakaran.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa kualitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu secara keseluruhan cukup berkualitas, maka peneliti merekomendasikan agar pelayanan pemadaman kebakaran dari penyelenggara pelayanan yaitu institusi pemadam kebakaran di mana pun, perlu ditingkatkan secara signifikan dari semua dimensi kualitas pelayanan yakni dimensi *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*. Ada tiga alasan yang rasional mengapa kualitas

pelayanan pemadaman kebakaran sangat perlu ditingkatkan. *Pertama*, bencana kebakaran tidak seperti bencana lainnya seperti gunung merapi, banjir, gelombang tsunami yang bisa diprediksi. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, termasuk kepada petugas atau kantor pemadam kebakaran sendiri. Dengan demikian, pelayanan pemadaman kebakaran yang berkualitas sangat diperlukan guna untuk meminimalisir kerugian baik harta atau jiwa yang ditimbulkan dari bencana kebakaran. *Kedua*, bencana kebakaran dapat meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti melihat adanya indikasi pengaruh yang signifikan antara bencana kebakaran dengan kemiskinan. Hal ini ditandai dari mayoritas responden yang merupakan korban kebakaran tidak mempunyai tempat tinggal pribadi. Jadi, karena Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), maka negara Indonesia melalui Pemerintah Pusat atau Daerah berkewajiban secara moril dan materil menurunkan angka kemiskinan, melindungi dan mengayomi seluruh warga negara dari ancaman kerugian harta dan jiwa yang diakibatkan oleh bencana kebakaran. *Ketiga*, pelayanan pemadaman kebakaran merupakan identitas dari institusi pemadam kebakaran di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi, pelayanan pemadaman kebakaran ini merupakan tolok ukur dari kinerja atau kualitas pelayanan secara keseluruhan institusi pemadam kebakaran. Demikian alasan mengapa pelayanan pemadaman kebakaran oleh instansi pemadam kebakaran sangat perlu ditingkatkan. Mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran di daerah, menurut hemat penulis diperlukan penelitian yang lebih lanjut yang *concern* pada peningkatan kualitas pelayanan pemadaman kebakaran.

Jika di atas telah diuraikan rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dalam konteks ini adalah Pemerintah Kota Bengkulu, maka ada salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan institusi pemadam kebakaran secara signifikan di level pemerintah pusat yaitu dibutuhkan sebuah kebijakan publik makro yang dapat menjadikan institusi pemadam kebakaran di daerah menjadi sebuah kementerian atau institusi vertikal. Ada empat argumentasi rasional yang dapat menjustifikasi perubahan struktur institusi pemadam kebakaran menjadi kementerian. *Pertama*, salah satu akar masalah kurang berkualitasnya pelayanan institusi pemadam kebakaran adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh institusi pemadam kebakaran. Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti mobil brandweer, mobil tangki, mobil tangga, helm, baju anti api, sepatu anti api dan alat keselamatan kerja lainnya yang masih sangat kurang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan kecilnya jumlah

penghasilan para petugas pemadam kebakaran adalah masalah-masalah yang hampir semua dimiliki oleh institusi pemadam kebakaran di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk institusi pemadam kebakaran. Dengan demikian apabila institusi pemadam kebakaran diubah menjadi sebuah kementerian (yang anggaran operasionalnya bersumber dari APBN) maka persolan-persoalan seperti yang telah disebutkan di atas akan dapat diatasi. *Kedua*, dengan menjadi sebuah kementerian pola rekrutmen dan pengembangan karier aparatur pemadam kebakaran juga akan dapat menjadi lebih baik. *Ketiga*, seluruh institusi pemadam kebakaran di Indonesia mempunyai tugas pokok yang kurang lebih sama yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran, upaya-upaya pemadaman kebakaran, dan melakukan upaya-upaya penyelamatan akibat bencana kebakaran atau bencana lainnya. Dengan kata lain seluruh institusi pemadam kebakaran di daerah mempunyai tugas pokok melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya. Dengan demikian, Kementerian Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Republik Indonesia adalah nomenklatur yang relevan untuk menggantikan atau merger Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan BASARNAS. Dengan dimergernya BNPB, BASARNAS, dan institusi Pemadam Kebakaran menjadi Kementerian Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana akan menghemat anggaran yang cukup signifikan, sekaligus mengakhiri tumpang tindih tugas pokok dan fungsi ketiga institusi tersebut. *Keempat*, sudah saatnya pemerintah melihat bahwa bencana kebakaran adalah masalah yang serius karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa bencana kebakaran cukup signifikan meningkatkan angka kemiskinan karena institusi pemadam kebakaran tidak cukup berkualitas dalam memberikan pelayanannya. Secara normatif apabila institusi pemadam kebakaran diubah menjadi sebuah kementerian atau institusi vertikal maka institusi pemadam kebakaran akan mampu meningkatkan pelayanannya secara signifikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahman, F. (2014). PBK Datang Terlambat. *Harian Rakyat Bengkulu*, p. 1. Bengkulu.
- Renins. (2014). 13 Ruko Ludes. *Bengkulu Express*. Bengkulu. Retrieved from <http://bengkuluekspres.com/13-ruko-ludes/>
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV. Fokus Media.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Zeithaml, V. A. (2005). *Customer Contributions and Roles in Service Delivery*. North Carolina: University of North Carolina.

## **PENERAPAN ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2009 DAN PP 27 TAHUN 1999**

**Wira Haryanti S.H., M.Si**

*Dosen FISIP Universitas Mustopo Beragama*

### ***Abstract***

The spirit of regional autonomy in the administration of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia has brought changes in the relationship and authority between the Government and regional governments, including in the field of environmental protection and management. In environmental management is actually an activity carried out between generations, because it includes multi-discipline.

To ensure the effective protection and environmental management of environmental and government agencies the government should coordinate, share information and cooperate to implement existing regulations so that in environmental planning, it is more leverage and beneficial for all sectors, both the environment and the communities surrounding it. Thus, to avoid the trap of environment-based development ideology and environmentally sound development paradigm of course more desirable. Of course, as far as this paradigm can be applied with consequent and high awareness, the results will be more sustainable and useful later on. With an environmentally-minded development paradigm, we preserve the ecology and socio-cultural community to ensure better quality of community life. Through law No. 32 of 1999 is expected to protect and manage the environment will run better than ever.

**Keywords:** Regulation, Understanding of environmental management

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Melalui peraturan yang mengatur mengenai lingkungan tentunya masyarakat akan lebih aktif menyoroti persoalan mengenai

lingkungan sehingga menjamin akan menciptakan kenyamanan serta keamanan mengenai kerugian yang dirasakan jika nantinya akan terjadi bencana alam yang mana hal ini dirasakan oleh manusia ketika manusianya sendiri tidak memberikan perawatan terhadap alam minimal disekitar tempat tinggal mereka.

Ketika nanti aka nada merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, kita semua telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan serta peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta.

Belakangan ini berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, karena banyak sekali masalah lingkungan yang timbul karena:

- 1) Pertumbuhan penduduk semakin meningkat;
- 2) Pengelolaan sumber daya yang tidak bijaksana dalam pemanfaatannya;
- 3) Pemakaian sumber daya semakin besar dan bertambah;
- 4) Kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengendalian dampak lingkungan;

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Aturan Hukum Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999?

### **Manfaat**

Penelitian tentang penerapan aturan hukum lingkungan di wilayah Sembulang dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan pengabdian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hingga terbentuk suatu naskah untuk merumuskan prinsip-prinsip AMDAL dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

### **Kajian Teori**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian Dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian Dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-Hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman Hayati;
- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Dan
- n. Otonomi Daerah.

### **Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan\
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

### **Aspek-Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

meliputi:

- a. Perencanaan; Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
  - Inventarisasi lingkungan hidup;
  - Penetapan wilayah ekoregion; dan
  - Penyusunan RPPLH.
- b. Pemanfaatan; pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;



- Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengendalian; Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- Pencegahan;
  - Penanggulangan; dan
  - Pemulihan.
- d. Pemeliharaan; Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- Konservasi sumber daya alam; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari SDA
  - Pencadangan sumber daya alam; SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
  - Pelestarian fungsi atmosfer meliputi: upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan, upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- e. Pengawasan; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Penegakan hukum : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## **PEMBAHASAN**

### **Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.**

Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan, sehingga Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang ditelaah secara cermat dan mendalam tertuang dalam pasal 2 dalam PP 27 tahun 1999 yang dilalui dalam menganalisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan melalui beberapa pemahaman mengenai hal-hal ini yakni:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
3. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dimaksudkan dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;

- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara. (sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3)

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sehingga berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kualitas hidup manusia lebih baik, untuk mencapai itu maka harus ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memiliki konsistensi salah satunya pemangku kepentingan di Negara ini termasuk juga yang sangat berperan penting yakni masyarakatnya, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, banyak hal yang terjadi dalam perubahan alam hari ini salah satunya pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga

memperparag penurunan kualitas lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pengawasan dan Sanksi Administratif**

#### **Pengawasan**

Melihat cara pengelolaan dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan berbagai dampak maka ada regulasi yang menerapkan didalam aturan mengenai pengawasan sesuai dengan pasal 71 didalam UU nomor 23 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Adapun pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang yang diatur dalam pasal 74 menurut UU 23 tahun 2009 yang merujuk pada pasal 71 yakni :

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;

- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

### **Sanksi Administratif**

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. tertuang didalam pasal 76 menurut UU 23 Tahun 2009 mengenai sanksi yakni Sanksi administratif terdiri atas:

- a) Teguran Tertulis;
- b) Paksaan Pemerintah;
- c) Pembekuan Izin Lingkungan; Atau
- d) Pencabutan Izin Lingkungan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Ternyata Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

### **Simpulan**

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga upaya selanjutnya untuk melestarikan fungsi lingkungan tercapai agar mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

### **Saran**

Membangun karakteristik masyarakat yang sadar akan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan waktu yang cukup signifikan dalam pemahaman mereka akan dampak pencemaran lingkungan yang semakin akut, seharusnya pemerintah dan lembaga independen lebih merencanakan dan mencanangkan aspek upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup lebih mendalam dalam hal penerapan aplikasi dari kebijakan yang dibuat sehingga kita semua meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang semakin meluas dan membahayakan masyarakat dimasa yang akan datang. Merujuk pada pembangunan yang berkelanjutan mengikuti perkembangan global dunia yang sudah mulai sangat perhatian terhadap lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.